Rhoma Dwi Aria Yuliantri

Pertanian di KULON PROGO dalam Cengkeraman KOLONIAL (1900-1930)

Daftar Isi

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris yang tidak lepas dari sektor pertanian sebagai mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya. Pertanian dipengaruhi oleh empat variable utama, yakni ekologi, pengaturan produksi, tenaga kerja, dan teknologi. Sistem produksi terkait dengan produsen dan mobilisasi produksi, ekologi dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan alam. Tenaga kerja menentukan hasil dan pendapatan sedangkan teknologi menentukan produksi Produktivitas pertanian dapat menentukan kesejahteraan petani, sedangkan iklim dan keadaan tanah menentukan jenis tanaman pertanian yang dapat dikembangkan.

Di Indonesia, hampir seluruh cuaca dan tanah menguntungkan untuk dibudidayakan aneka ragam tanaman pertanian. Ada empat sistem pertanian yang telah lama dikenal di Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. Sistem perladangan (*shifting cultivation system*), yaitu jenis kegiatan pertanian yang dilakukan secara berpindah-pindah, dengan penanaman berbagai tanaman berumur pendek, terutama tanaman pangan.

2. Sistem persawahan (*wet rice cultivation system*), yaitu jenis kegiatan pertanian yang dilakukan di suatu areal tertentu dengan penanaman tanaman pangan, terutama padi, dengan pola dan siklus yang tertentu pula.

3. Sistem kebun (*garden system*), yaitu kegiatan pertanian yang menggarap tanaman (perdu) berusia panjang *(perennial)* pada lahan tetap.

4. Sistem tegalan (*dry field system*), yaitu tipe kegiatan penanaman tanaman pangan (*food crops*) secara tetap pada lahan kering.

Pertanian menjadi mata pencaharian dibudidayakan sudah lama dan menjadi tumpuan ekonomi bagi masyarakat lingkup pedesaan, bahkan sebelum penjajah Belanda datang ke Jawa. Justru hasil pertanian berupa rempah-rempah (perkebunan) merupakan salah satu faktor penarik kehadiran para pedagang-pedagang Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Sejak masa penjajahan antara pertanian tanaman pangan dan pertanian tanaman ekspor biasanya dibedakan.

Tanaman ekspor adalah tanaman pertanian dengan hasil tanaman dagang, seperti tebu, kopi, tembakau, dan lainnya, sedangkan pertanian tanaman pangan berupa palawija, padi, buah-buahan,

dan sayur-sayuran. Namun demikian, kondisi pertanian sebagai penyokong ekonomi rakyat tidak dapat lepas dan kebijakan yang diterapkan penguasa.

Tampaknya, selama pemerintah kolonial Hindia Belanda menguasai Jawa, pertanian mendapat perhatian tersendiri. Kondisi tanah dan ekologi dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk membudidayakan pertanian sebagai penyokong utama ekonomi negeri Belanda.

Pada abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia Belanda melaksanakan perubahan birokrasi yang berdampak terhadap kebijakan pelaksanaan sistem perkebunan. Budidaya tanaman ekspor mengakibatkan timbulnya golongan kapitalis, yaitu tampilnya pengusaha-pengusaha Eropa pengelola industri perkebunan dan golongan buruh yang terdiri dari kaum pribumi.

Kondisi itu memunculkan bentuk pertanian baru, yaitu pertanian tanaman pangan yang berdampingan dengan pertanian tanaman ekspor. Dalam pengawasan pertanian, Pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan para penguasa lokal (*pangreh praja*) untuk bertanggungjawab terhadap produksi pertanian, di lain pihak bagi petani-petani lokal diwajibkan untuk menanam dan menjual hasil produksi kepada pemerintah dengan harga tertentu atau sering disebut dengan *pengiriman paksa*.

Dalam kepemilikan tanah para petani harus berkompetisi dengan para kapitalis Belanda. Persaingan itu merupakan persaingan tidak seimbang karena pihak penguasa Belanda memiliki modal dan dukungan politik yang kuat. Apalagi dengan dikeluarkannya Undang-undang Agraria tahun 1870 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang secara bertahap menghapus sistem tanam paksa dan membuka bagi penanam swasta sehingga sistem sewa tanah semakin kuat.

Penanaman tanaman ekspor yang berjangka panen singkat, seperti gula dan tembakau dipadukan dengan produksi panen subsistensi, khususnya gula dan beras, disatukan dalam hubungan yang saling bergantung berdasarkan kegunaan lahan padi. Sistem yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda tersebut menjadikan kehidupan petani pribumi semakin memburuk karena penguasaan tanah dan eksploitasi tenaga kerja. Hal itu menyebabkan kaum moralis dari negeri Belanda bangkit untuk menggerakkan hati nurani Calvinis Belanda dengan isu "merosotnya kesejahteraan penduduk".

Menjelang abad ke-20, mulai muncul usaha-usaha untuk memperbaiki merosotnya tingkat kesejahteraan pribumi dengan pembaharuan kebijakan politik, yaitu gagasan politik etis. Menjelang tahun 1900, isu politik etis tersebut telah gencar diperbincangkan di negeri Belanda dan pada tahun 1901 mulai diterapkan politik etis menyangkut masalah-masalah desentralisasi, perubahan-perubahan pemerintahan, perbaikan kesehatan rakyat dan emigrasi (transmigrasi), perbaikan pertanian dan peternakan, pembangunan irigasi dan lalu lintas.

Dalam bidang pertanian, perhatian pemerintah kolonial Hindia Belanda direalisasikan dengan didirikannya *Afdeeling Landbouw* di Departemen *Landbouw*, *Nijverheid,* dan *Handel* pada tahun 1905. Kebijakan baru itu merupakan titik awal pembangunan masyarakat desa yang secara umum adalah petani.

Pada masa politik etis, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda juga melakukan eksperimen pertanian, seperti dilakukan di *Afdeeling* Kulon Progo. Kulon Progo merupakan bagian wilayah dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang saat ini dikenal sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memiliki kondisi yang cukup unik dengan topografi yang relatif baik sehingga

di sebagian daerah digunakan untuk membudidayakan tanaman ekspor. Hal inilah yang menyebabkan tanaman pertanian pangan harus berdampingan dengan tanaman ekspor.

Di bab-bab selanjutnya dalam buku ini akan dibahas tentang kondisi pertanian di Kulon Progo pada awal abad ke-20, tepatnya dari tahun 1900 hingga tahun 1930, yang berada di bawah cengkeraman kekuatan kolonial. Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di bidang pertanian tentunya memberikan dampak dan pengaruh yang cukup besar bagi pertanian dan kaum petani di Kulon Progo yang akan ditelisik melalui pembahasan dalam buku ini.

Bab 1

Kulon Progo Awal Abad ke-20

Alam merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam produksi pertanian. Untuk memperoleh hasil yang baik, para petani harus pandai menyesuaikan dengan kondisi alam, iklim dan tanah akan sangat mempengaruhi jenis tanaman, teknik bertanam, kualitas produksi dan bentuk pertanian. Demikian pula dengan alam di Kulon Progo.

Afdeeling Kulon Progo terletak di bagian barat Kasultanan Yogyakarta, berbatasan dengan Sungai Progo di sebelah timur, Samudera Hindia (*Indische Ocean*) di selatan, *Regentschap* Magelang (Residen Kedu) di sebelah barat dan *Regentschap* Purworejo (Residen Kedu) di sebelah utara.[1]

Alam Kulon Progo

Kulon Progo merupakan daerah topografi unik, memiliki tanah dataran dan deretan pegunungan yang mencapai ketinggian hingga 900 meter. *Ondedistrik* Lendah (*Regentschap* Adikarto) dan *Onderdistrik* Sentolo (*Regentschap* Kulon Progo) serta Distrik Pengasih memiliki tanah berupa tanah dataran, sedangkan Distrik Nanggulan dan *Onderdistrik* Kokap memiliki tanah pegunungan.[2]

Selain itu, dapat ditemui pula deretan pegunungan kapur di *Onderdistrik* Sentolo, Lendah, Nanggulan bagian selatan, utara Panjatan,[3] dan di bagian barat *Afdeeling* Kulon Progo yang merupakan perbatasan dengan Bagelan[4] (Purworejo). Jenis tanah berkapur ini kurang menguntungkan bila digunakan untuk kegiatan pertanian.

Menurut laporan J. J. Oschen, konsultan ahli pertanian di jawatan pertanian, dapat diketahui beberapa jenis tanah di daerah Kulon Progo. *Onderdistrik* (kecamatan) Sentolo, Distrik (kewedanan) Pengasih tepatnya di Desa Sentolo memiliki jenis tanah andesitraten dengan ketinggian sekitar 100 m di atas permukaan air laut.[5]

Jenis tanah laterit juga terdapat di Desa Terusan, *Onderdistrik* Watumurah, Distrik Nanggulan dengan ketinggian 300 meter di atas permukaan air laut dan di Desa Paras, *Onderdistrik* Kalibawang, Distrik Nanggulan dengan ketinggian 200 meter di

atas permukaan air laut. Lain halnya dengan Desa Worawari, *Onderdistrik* Sentolo, Distrik Pengasih, yang memiliki ketinggian 100 m di atas permukaan air laut memiliki jenis tanah *margalite*. Jenis tanah ini bila memiliki air cukup akan menghasilkan produktivitas pertanian yang baik.

Selain kesuburan tanah yang mempunyai pengaruh terhadap hasil pertanian, ada faktor rain yang mempunyai peranan penting (khususnya sawah), yaitu air.[6] Persediaan air di Kulon Progo sedikit banyak dapat dilihat dari aliran sungai di daerah tersebut.

Di sisi timur Kulon Progo mengalir sebuah sungai memanjang dari utara ke selatan hingga Samudera Hindia yang lebih dikenal dengan Sungai Progo. Aliran Sungai Progo berasal dari Gunung Sindoro[7] yang pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda telah dialihkan ke sawah-sawah melalui aliran Van der Wijck (Godean, Mlati), aliran Kebonongan (Bantul), saluran ingasi (daerah pengairan Sewu-Galur).[8] Aliran tersebut banyak dimanfaatkan untuk irigasi pertanian dan perkebunan hingga pada saat ini.

Di sebelah barat Kulon Progo terdapat Sungai Bagawanta yang merupakan perbatasan *Regentchap* Adikarto dengan *Regentchap* Purworejo.[9] Mengalir pula sebuah sungai di selatan Kulon Progo yang sering disebut dengan Sungai Serang yang alirannya melewati daerah Remon, Wates, Adikarto, Pengasih hingga Sermo.[10] Walaupun terdapat beberapa aliran sungai akan tetapi topografi tanah yang bergunung-gunung menyebabkan aliran air tidak dapat menyebar ke seluruh Kulon Progo.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda tercatat bahwa di *Afdeeling* Kulon Progo memiliki rata-rata bulan basah pada bulan Oktober sampai bulan Mei. sedangkan

jumlah bulan kering terjadi pada bulan Agustus dan September bulan lembab berjalan dari bulan Juni hingga Juli.

Berdasarkan survei pada tahun 1929 di daerah Pengasih dan Sentolo, pada bulan Juni hingga September memiliki bulan kering, bulan Oktober sampai Mei merupakan bulan basah. Di daerah Nanggulan bulan kering relatif pendek, yaitu bulan Juli hingga September, sedangkan bulan basah berlangsung dari bulan Oktober hingga bulan Juni.[11]

Iklim di daerah Kulon Progo adalah iklim dingin dengan suhu harian 68^{o} fahrenheit dan suhu maksimum pada siang hari mencapai 82^{o} fahrenheit.[12] Atau dalam skala celcius adalah $36,44^{o}$ celcius pada suhu maksimum dan $30,22^{o}$ celcius pada suhu minimum.

Struktur Pemerintahan dan Demografi

Kulon Progo merupakan bagian dari wilayah Yogyakarta yang dulunya dimiliki oleh Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. Kedua kerajaan ini merupakan keturunan dari Kesultanan Mataram Islam yang kemudian terpecah setelah diadakannya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. [13]

Pada akhirnya, Kesultanan Mataram Islam terbagi menjadi empat kerajaan yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman Yogyakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran Surakarta. Kini, Kulon Progo menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada era kolonial, Belanda secara langsung maupun tidak telah menanamkan pengaruh dan kekuasaannya di wilayah Yogyakarta.[14] Belanda menempatkan wakil-wakilnya yang pada

mulanya berkedudukan di Magelang. Namun, setelah Perang Diponegoro (Perang Jawa) yang berakhir pada tahun 1830, kedudukan wakil Belanda tersebut dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta.[15]

Yogyakarta memiliki total luas wilayah 3172,31 km^2 (yang merupakan wilayah milik Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman).[16] Wilayah Kasultanan Yogyakarta sebelum tahun 1926, terdiri dari Kabupaten Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kalasan, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul.[17]

Setelah diadakan reorganisasi *pangreh praja* pada tahun 1926, maka Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi empat kabupaten, yaitu Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, dan Yogyakarta yang masing-masing merupakan daerah administratif dan bukan otonomi. Kabupaten Kulon Progo yang semula terletak di Pengasih kemudian dipindahkan ke Sentolo dengan membawahi delapan *onderdistrik*.[18]

Untuk menangani urusan pemerintahan, Raja Yogyakarta dibantu oleh para pembantunya. Seorang patih bertugas menjalankan pemerintahan umum, daerah manca negara,[19] termasuk *Afdeeting* Kulon Progo diperintah oleh seorang bupati dengan gelar tumenggung yang bertanggungjawab kepada patih. Dalam menjalankan tugasnya, tumenggung dibantu oleh satu orang sekretaris kabupaten, seorang mantri kabupaten, seorang juru tulis pangkat satu, dua orang juru tulis, satu orang juru tulis pembantu, dan empat opas kantor.

Kabupaten dibagi-bagi lagi menjadi distrik-distrik, masing-masing diperintah oleh seorang panji yang sejak tahun 1826 disebut sebagai wedana. Setiap distrik terdiri dari *onderdistrik* yang masing-masing dikepalai oleh seorang asisten wedana.

Kabupaten Adikarto (di bawah Kadipaten Pakualaman) dipimpin oleh seorang bupati dengan empat orang asisten wedana (kepala *onderdistrik*) yang ditempatkan di wilayah Bendongan, Brosot, Temon, dan Panjatan.

Berdasarkan Undang-undang Kasultanan 1927 No. 9, Kabupaten Kulon Progo terdiri dari distrik Pengasih, Lendah, dan Nanggulan. Sedangkan Adikarto berada di bawah penguasaan Kadipaten Pakualaman. Distrik Pengasih mempunyai tiga *onderdistrik*, yaitu Pengasih terdiri dari 17 kelurahan, Sermo dengan 31 kelurahan dan Sentolo dengan 17 kelurahan. Distrik Lendah hanya memiliki satu *onderdistrik* dengan 18 kelurahan. Distrik Nanggulan memiliki tiga *onderdistrik*, yaitu Watumurah dengan 16 kelurahan, Samigaluh dengan 16 kelurahan dan Kalibawang dengan 15 kelurahan. Distrik Adikarto sendiri memiliki dua *onderdistrik*, yaitu Wates dan Temon, yang masing-masing memiliki 17 kelurahan.

Total luas daerah Kulon Progo adalah 567,50 km^2 (Kulon Progo 445 km^2 dan Adikarto 122,50 km^2),[20] sedangkan rata-rata kepadatan penduduk di Kulon Progo tahun 1930 adalah 427,2 orang per km^2 dan 826,50 orang per km^2 di daerah Adikarto.[21]2l Gambaran mengenai jumlah penduduk Kulon Progo didapat dari laporan sensus pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1920 dan 1930.

Dari informasi tersebut pada tahun 1920 tercatat jumlah total penduduk Kulon Progo 216.887 jiwa, 282.089 jiwa pada tahun 1927 dan pada tahun 1930 terjadi peningkatan menjadi 291.515 jiwa (lampiran 2,3 dan 4). Diperkirakan selama tahun 1920 hingga 1930 perkembangan penduduk rata-rata tiap tahunnya sebanyak 62.833 orang. Pada tahun 1940 jumlah penduduk terus mengalami peningkatan hingga berjumlah 320.962 orang.[22]

Dari laporan J. van Gelderen ditunjukkan kepadatan penduduk pada tahun 1920 di distrik-distrik Kulon Progo. Daerah paling padat adalah Distrik Sogan dengan kepadatan penduduk 659,8 orang per km^2, disusul kemudian Distrik Sentolo 593,4 orang per km^2, Pengasih 381 orang per km^2, Nanggulan 334,6 orang per km^2, dan Kalibawang yang merupakan distrik paring jarang penduduknya dengan tingkat kepadatan 319,6 orang perkm^2.[23]

Di daerah utara dan selatan Kulon Progo secara kuantitatif memiliki perbedaan rata-rata kepadatan penduduk yang signifikan. Bagian utara tercatat jumlah penduduk lebih sedikit dan dibandingkan bagian selatan tampak jumlah penduduk lebih besar- pada tahun 1930 hampir di setiap distrik terjadi peningkatan jumlah penduduk.

Distrik Nanggulan dari tahun 1920-1930 tercatat sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk yang sedikit. Kondisi tersebut mungkin dipengaruhi oleh ketimpangan kondisi lingkungan di Distrik Nanggulan dengan topografi yang kurang menguntungkan, seperti tanah pegunungan sehingga berdampak pada produktivitas pertanian. Asumsi ini berdasarkan penjelasan Widjojo Nitisastro mengenai penurunan jumlah penduduk yang dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu kondisi lahan yang buruk, perang, wabah penyakit, dan migrasi.[24]

Malthus, seperti dijelaskan Boomgard mengatakan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, kalau penurunan angka kematian (mortalitas) secara besar-besaran tidak diikuti penurunan angka kelahiran (natalitas) yang sebanding. Angka kematian akan turun kalau tingkat gizi, standar perumahan dan pengaturan air mengalami peningkatan, serta penyakit menular bisa dibasmi. Angka kelahiran akan stabil bila pendapatan perkapita rendah.[25]

Akan tetapi, peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di Kulon Progo pada tahun 1920-1940 tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan pisau analisis Malthus. Hal itu disebabkan karena data yang diperoleh kurang memadai, walaupun pada tahun 1940 ditemukan data tentang tingkat kelahiran yang lebih tinggi dari tingkat kematian.

Penjelasan Malthus memang beralasan mengingat pada tahun tersebut perhatian dalam bidang kesehatan semakin baik, sehingga wabah penyakit menurun, dan hal ini berdampak semakin kecilnya tingkat kematian. *Afdeeling* Kulon Progo sejauh ini (1900-1930) juga tidak ditemukan bukti tentang adanya wabah penyakit.

Penjelasan di atas merupakan beberapa asumsi yang memungkinkan untuk menjelaskan perubahan demografi di Kulon Progo. Hal ini mengingat sulitnya mengidentifikasi demografi dan sosial ekonomi di belakangnya, serta minimnya sumber yang ada.

PERKEMBANGAN PENDUDUK KULON PROGO
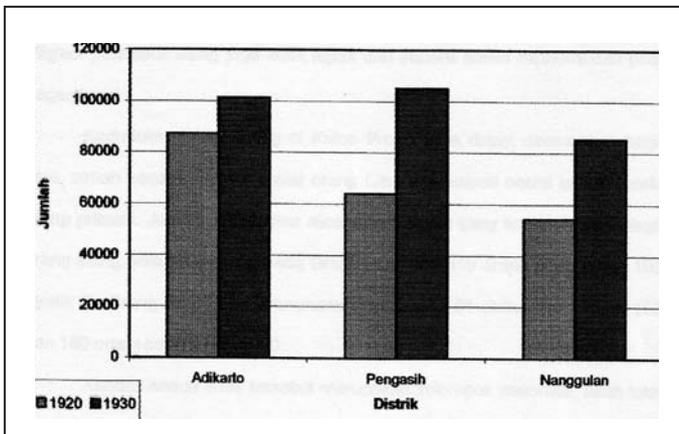
Sumber: Diolah dari *Inheemsche Bevolking van Oost Java: Census of 1930 Innetherlands India Vostelling 1930 deel III*, Batavia: Landsdrukkerij, 1934, hal. 28.

Dari sensus dapat dilihat bahwa penduduk pribumi merupakan kelompok mayoritas di Kulon Progo, sedangkan persentase penduduk asing dari hasil sensus menunjukkan peningkatan. Peningkatan persentase jumlah penduduk asing ini dimulai sejak abad ke-19, dimungkinkan erat kaitannya dengan masuknya imigran dari luar negeri.

Para imigran yang membentuk keluarga akan memiliki tingkat pertumbuhan lebih besar dibandingkan dengan pendatang lainnya yang tidak menetap. Secara kuantitatif jumlah imigran yang menetap dari masa ke masa berubah-ubah. Dalam hal ini unsur menetap imigran Cina jauh lebih besar, dilihat dari jumlah penduduk Cina menempati angka tertinggi dalam kategori penduduk asing.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi politik atau sosial dan ekonomi di Jawa, yaitu adanya sarana dan prasarana makin lengkap, ekonomi perkebunan semakin mapan hingga daerah luar Jawa, dan tenaga kerja murah sehingga mampu mendorong para investor untuk menanamkan sahamnya untuk pertanian perkebunan yang menguntungkan. Migrasi penduduk asing juga tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi dan politik negara asal.

Kedudukan orang-orang dari bangsa asing di Kulon Progo tidak dapat diremehkan begitu saja. Hal itu disebabkan karena secara struktur sosial, jumlah orang Cina yang ada di Kulon Progo menempati posisi kedua setelah jumlah orang pribumi. Selain itu, jumlah orang Cina menempati angka yang tinggi dalam kategori orang asing, yaitu berjumlah 199 orang pada tahun 1920 dan 819 orang pada tahun 1930. Sedangkan orang Eropa dan keturunannya berjumlah 91 orang pada tahun 1920 dan 160 orang pada tahun 1930.

Kendati kedua etnis tersebut merupakan kelompok minoritas, akan tetapi peran kaum minoritas dalam memainkan negeri jajahan cukup kuat, baik dalam sektor ekonomi maupun politik. Hal ini disebabkan mereka memiliki dukungan politik dan modal yang cukup kuat.

Orang Cina, misalnya, walaupun tidak menguasai sektor politik tetapi memiliki kedudukan kuat dalam bidang ekonomi. Kondisi ini didukung oleh orang Jawa (pribumi) yang kurang memanfaatkan peluang-peluang dalam kegiatan ekonomi, seperti sebagai pedagang dan distributor, lain halnya dengan orang Cina.

Menurut Wertheim, kondisi ini disebabkan orang-orang pendatang seperti halnya orang Cina tidak begitu terikat pada tradisi dan norma-norma yang masih melekat pada orang Jawa (pribumi), sehingga mereka berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk memenuhi fungsi-fungsi pedagang perantara.[26]

Masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda, demikian menurut Furnivall, merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural societies*), yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik.[27]

Dalam masyarakat majemuk sebagai tipe masyarakat mereka yang berkuasa dan dikuasai memiliki perbedaan ras. Orang-orang Belanda sebagai golongan minoritas sekaligus sebagai penguasa yang memerintah bagian amat besar yaitu orang-orang pribumi. Golongan orang-orang Tionghoa (Cina), sebagai golongan terbesar di antara orang-orang Timur Asing lainnya, menempati kedudukan menengah di antara kedua golongan Belanda dan pribumi.

Orang-orang Belanda, Cina dan pribumi tumbuh di atas dasar sistem kasta tanpa ikatan agama, kebudayaan, dan bahasa mereka masing-masing. Hasilnya, masyarakat golongan pribumi tidak memiliki kehendak bersama (*common will*)

Keadaan ini digambarkan lebih lanjut oleh Furnivall bahwa orang-orang Belanda datang ke Indonesia untuk bekerja, akan tetapi mereka tidak tinggal menetap di sana. Kehidupan semata-mata berada di sekitar pekerjaan itu, dan mereka memandang masalah-masalah kemasyarakatan, politik ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak sebagai warga negara, melainkan sebagai kapitalis atau majikan dari buruh-buruh mereka.

Banyak pula mereka yang tinggal sampai 20 tahun atau lebih lamanya, akan tetapi mereka sesudah itu kembali ke negerinya. Orang-orang Timur Asing (terutama orang-orang Cina), seperti halnya orang-orang Belanda, juga datang ke Indonesia semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Orang-orang pribumi dalam hal itu tidak lebih daripada pelayan di negerinya sendiri.

Penggolongan masyarakat yang terjadi atas dasar perbedaan ras, maka pola produksinya terbagi atas dasar perbedaan ras pula, dalam masing-masing ras memiliki fungsi produksi sendiri-sendiri: Orang-orang Belanda dalam bidang perkebunan, penduduk pribumi dalam bidang pertanian (tanaman pangan), dan orang-orang Cina menjadi perantara di antara keduanya.

Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa hubungan antara pembagian suku dan ekonomi tidak terjadi secara kebetulan, ada relasi-relasi kekuasaan dan status yang kompleks. Kelompok-kelompok etnis biasanya juga terbagi dalam kelas dan status, dan ada hubungan-hubungan tertentu selain hubungan pasar antara satu komunitas dengan komunitas yang lain.

Perkembangan Penduduk Kulon Progo Menurut Etnis
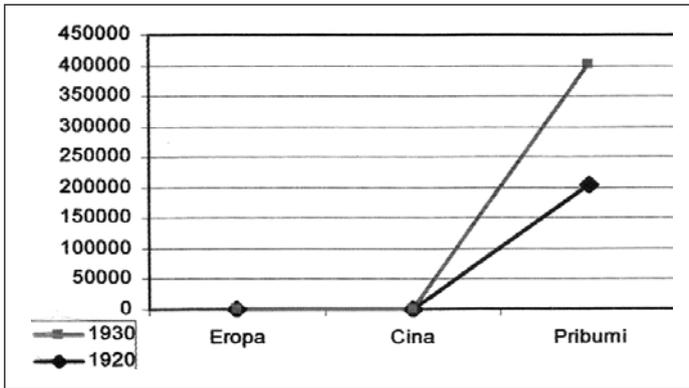
Sumber: Diolah Dari *Inheemsche Bevolking van Oost Java: Census of 1930 Innetherlands India Vostelling 1930 deel III*, Batavia: Landsdrukkerij, 1934, hlm. 28.

Data sensus penduduk menyebutkan perpindahan penduduk dari Kulon Progo ke daerah Jawa Tengah sebesar 17.557 orang.[28] Sedangkan jumlah penduduk yang melakukan perpindahan ke Kota Yogyakarta sebesar 3.008 orang dari Pengasih, 961 orang dari Nanggulan dan 2.902 orang dari Adikarto ke Kota Yogyakarta.[29] Jumlah penduduk Kulon Progo yang melakukan migrasi terbilang tinggi untuk wilayah Yogyakarta dengan menempati urutan kedua setelah Bantul dengan jumlah 10.536 orang.[30]

Untuk data transmigrasi didapat keterangan bahwa 123 orang pada tahun 1932 melakukan transmigrasi ke daerah Lampung. Dan baru pada tahun 1934 sebanyak 134 orang mulai melakukan transmigrasi ke daerah selain Lampung, yaitu ke Bengkulu. Kemudian, pada tahun 1937 transmigrasi dilakukan ke Lubuk Linggau dan Belitung. Sebab-sebab yang dapat menimbulkan perpindahan penduduk dicakup dalam faktor penarik dan pen-

dorong (*push and pull factor*). Faktor penarik dan pendorong meliputi faktor ekonomi, kesehatan dan tekanan pemerintah kolonial (politik).

Sementara itu, Sumatera mempunyai daya tarik yang cukup besar karena merupakan daerah perkebunan yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Di samping itu ledakan penduduk di Pulau Jawa menyebabkan semakin sempitnya lahan yang dikerjakan, dalam bahasa Geertz dijelaskan pertambahan penduduk yang semakin subur tetapi tidak diikuti produksi perkapita mengakibatkan petani di Jawa harus membagi tanah, pekerjaan dan produksinya sehingga muncullah kemiskinan bersama.[31] Penjelasan Geertz tersebut barangkali menjadi salah satu alasan atau dorongan untuk melakukan migrasi ke daerah luar Jawa.

Ledakan penduduk dan isu kemiskinan inilah yang mengkhawatirkan pemerintah kolonial, yang mulai memperhatikan kondisi penduduk. Di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan tenaga kerja dalam skala besar untuk pengembangan perkebunan di Sumatera. Perlu dicatat bahwa perpindahan penduduk dari Jawa ke daerah luar Jawa merupakan salah satu "*guiding principles*" dalam pelaksanaan kebijakan politik etis, bukan atas kesadaran penduduk.

MIGRASI PENDUDUK KULON PROGO

Daerah Asal	Daerah yang Dituju	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939
Kulon Progo	Lampung	119	-	193	40	432	480	331	1.552
Adikarto		98	-	30	24	194	267	410	1.113
Kulon Progo	Lubuk Linggau	-	-	-	-	-	148	192	233
Adikarto		-	-	-	-	-	79	69	38
Kulon Progo	Belitung	-	-	-	-	-	70	224	-
Adikarto			-	-	-	-	185	-	-
Kulon Progo	Bengkulu	-	-	114	-	86	-	-	-
Adikarto		-	-	-	-	67	-	-	-

J.E. Jasper, *Memorie van Overgave*, 1929, hlm. 32-35 No. 7e (Arsip Nasional Republik Indonesia).

Penduduk Kulon Progo pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Pada sensus yang dilakukan pada tahun 1930 tercatat 134.542 orang bekerja sebagai petani. Selain bertani, penduduk Kulon Progo juga memiliki mata pencaharian pada sektor lain, seperti pedagang, tukang kayu dan pengrajin bambu (88.240 orang), pengrajin batik dan tekstil (12.733 orang).[32]

Catatan Akhir Bab 1

1. A. Jonkers,. *Nota de Agrarische Heruorging en Economische werkzaamheid in Koelon Progo en Adikarto*, t.t., htm. 1 (Arsip Paku Alam No. 2580).
2. *Ibid*.
3. *Ibid*.
4. C. W. Bagchus, *Maandgemiddelden. en Bouwgrondoccupaties; per District van de Negen Belangrijkste Inlandsche Landbouwgewassen op Java en Madoera in de jaren 1920 tot en met 1925*, Weltevreden: Landsdrukkerij, 1929,hlm.134.
5. J. J. Ochse, *Overzicht van onderstammenproeven bij Vruchtboomen*, Weltevreden: Landsdrukkerij, 1929, hlm. 11. Tingkat kesuburan tanah laterit (Brown Young, Andesitic, Lateric Soils) di Kulon Progo sangat beragam. Untuk daerah teras-teras Progo mempunyai produktivitas yang sedang. Pada ketinggian 100-400 meter memiliki nilai pertanian yang rendah. (Monografi Daerah Istimewa Yogyakarta, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan-Ditjen Kebudayaan Departemen pendidikan dan Kebudayaan RI, t.t., hlm. 18).
6. Geertz menyimpulkan bahwa air (pengaturan air) lebih penting daripada tipe tanah dalam penanaman padi. (Clifford Geertz. "Agriculture Involution", terj. S. Supomo, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologis di Indonesia*, Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1976, hlm.30-31).
7. A. Jonkers, *Nota de Agrarische Hervorging en Economische Werkzaamheid in Koelon Progo en Adikarto, op. cit*., hlm. 1

8. J. E. Jasper, *Memorie van Overgave*,1929, hlm. 8. No. 7e (Arsip Nasional Republik Indonesia).

9. C. W. Bagchus, *loc. cit.*

10. Arsip Paku Alam No. XV, belum diolah.

11. Sesuai dengan teori Mohr yang mengemukakan batasan-batasan baru untuk menunjukkan adanya kekuatan periode kering terhadap tanah dari gambaran curah hujan. Menurut Mohr bulan basah adalah suatu bulan yang curah hujannya lebih besar dari 100 mm. Bulan kering adalah suatu bulan dimana curah hujan lebih kecil dari 60 mm. sedangkan bulan lembab adalah suatu bulan dimana curah hujan lebih besar dari 60 mm tetapi lebih kecil dari 100 mm. (Soekardi Wisnubroto dkk. *Asas-asas Meteorologi Pertanian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm.74.)

12. A. Jonkers , *op. cit.*, hlm. 2.

13. Perjanjian Giyanti melahirkan Kasultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Nama Yogyakarta berasal dari Ayodhdya, ibukota negari Kosala. Pada abad 12-10 SM kota ini merupakan daerah padat di India dengan tradisi agama Hindu. Kosala dianggap mempunyai hubungan dekat dengan Jawa (Benares, Maarten Timmer, *Child Mortality and Population Pressure in The D.I. Jogjakarta, Java, Indonesia*, Rotterdam: Bronder-Offset, 1961, hlm. 20).

14. Raja Yogyakarta memiliki kedudukan kokoh baik secara kultural maupun struktural, dengan pemerintahan yang diatur secara terpusat. Untuk menguasai daerah kerajaan maka sejak berdirinya Kasultanan, Belanda selalu mendampingi Sultan dalam menjalankan kekuasaan, atau dengan kata lain, Sultan dimanfaatkan sebagai pengawas daerah kerajaan. Status Pakualaman dan Kasultanan tidak diatur oleh undang-undang (*ordonatie*) yang berlaku umum di wilayah Hindia Belanda, tetapi dalam *Lange Verklaring* perjanjian antara Sultan dan Belanda, sedangkan *Korte Verklaring* merupakan pewalian yang berlaku antara Belanda dengan Paku Alam (Soedarisman Poerwokoesoemo, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984, hlm. 3).

15. Ibid.

16. Pada masa pemerintahan Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono II, Pangeran Notokusumo (Adik Sultan Hamengkubuwono II) dan putranya Notodiningrat ditahan Belanda. Pada waktu Inggris berkuasa pada tahun l811, Notokusumo dibebaskan dan diberi tanah. Pangeran Notokusumo kemudian diberi gelar Adipati Paku Alam, memiliki tanah Bagelan dan Panjang. Namun setelah Perang Diponegoro 28 April 1930, wilayah tersebut diganti dengan daerah Adikarto, di Kulon Progo bagian Selatan. Selanjutnya lihat profil Republik Indonesia, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yayasan Bakti Nusantara, hlm. 16.
17. Soedarisman Poerwokusumo, *op. cit.*, hlm. 85.
18. *Rijksblad van Djogjakarta* 1927 No. 9.
19. Mancanegara merupakan daerah pajak tidak langsung.
20. A. Jonkers , *op. cit.,* hlm. 3.
21. *Ibid*.
22. Laporan J. C. van Hoeven 14 Oktober 1941 (Arsip Paku Atam No.3946).
23. J. van Gelderen, *Mededeelingen van het Statistich Kantoor: Bevolkingsdichtheid in Landbouw op Java*, Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. hlm.12.
24. Widjojo Nitisastro dan Nathan Keyfitz, *Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia*, Djakarta: Pembangunan, 1955, hlm. 291-554. Walaupun kesuburan lingkungan secara umum tidak dapat menjelaskan perbedaan penduduk di berbagai daerah, akan tetapi sebagai kesimpulan sementara bahwa kepadatan penduduk terkait dengan taraf kesuburan tertentu.
25. Peter Boomgard, "Children of The Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java 1795-1880". terj. Monique Sosman & Koesalah Soebagyo Toer, *Anak Jajahan Negeri Belanda*, Jakarta: Djambatan, 2004,hlm.4-5.
26. A. Daliman, *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal XX*: *Politik Kolonial dan Sistem Administransi Pemerintahan Hindia-Belanda,* Diktat IKIP Yogyakarta, hlm. 43.

27. J. S. Furnivall, Netherlands-India: *A Study of Plural Economy, Cambridge at The University Press*, reprinted 1967: hlm. 446-469, dalam Dr. Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001,hlm.29.
28. *Nederlandsch-Indie der in de Maand November 1920 Gehouden Volkstelling*, 1934, hlm. 26.
29. *Inheemsche Bevolking van Oost Java: Census of 1930 Innetherlands India Vostelling 1930 deel III*, Batavia: Landsdrukkerij, 1934, hlm. 26.
30. *Ibid,* hlm.26.
31. Clifford Geertz, "Agriculture Involution", terj. S. Supomo, Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologis di Indonesia, *op. cit.*, hlm. 31.
32. *Inheemsche Eevolking van Oost Java:* Census of 1930 Innetherlands India Vostelling 1930 deel III, Batavia: Landsdrukkerij,1934. hlm. 86-92.

Bab 2

Sistem Pertanian di Kulon Progo 1900-1930

Kondisi ekonomi termasuk pertanian tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi demografis dan topografis tetapi terkait pula dengan sistem politik yang diterapkan. Sistem politik yang diterapkan akan mempengaruhi jenis dan sistem pertanian, misalnya, pada masa sistem tanam paksa (*cultuur stelsel*).[1] Program pembangunan Bosch, seperti penyerahan 1/5 lahan pertanian untuk ditanami hasil komoditi ekspor, telah memaksa

penduduk (petani) secara wajib memasukkan tanaman ekspor dalam jenis pertanian mereka. Sistem liberal yang diterapkan kemudian juga memberi perhatian besar terhadap perkebunan (tanaman ekspor) sehingga berimplikasi terhadap pola kerja petani sebagai penggarap.

Kebijakan Politik Etis

Munculnya program-program yang diterapkan Pemerintah Hindia Belanda tersebut tidak terlepas dari kondisi politik negeri Belanda sebagai negara induk. Beberapa perubahan iklim politik di negeri Belanda, seperti pada awal abed ke-20, tampaknya mempunyai pengaruh signifikan terhadap perubahan sistem politik di Jawa.

Berawal dan kegagalan sistem liberal selama tiga dekade sebelumnya (1870),[2] menjadi salah satu alasan perubahan kebijakan tersebut. Sistem liberal yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Agraria 18702 pada hakikatnya justru menjadi alat pra pemilik modal asing untuk menyewa tanah seluas-luasnya dan selama-lamanya, sehingga berimplikasi terhadap mundurnya tingkat kesejahteraan pribumi.

Sementara itu, pihak pengusaha-pengusaha swasta Belanda sangat diuntungkan dengan perkembangan perkebunan-perkebunan. Merosotnya kesejahteraan pribumi,[3] krisis ekonomi 1883-1885, disusul depresi tahun 1895 telah meruntuhkan impian kaum liberal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lantangnya gagasan yang berkembang di negeri Belanda saat itu membangunkan kesadaran pemerintah agar memperhatikan kewajiban moralnya dan menghentikan eksploitasi dengan melaksanakan tugas balas budi sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan pribumi.

Pada umumnya, gagasan moral tersebut muncul dari kalangan politisi Belanda. Beberapa tokoh yang paling dikenal di antaranya adalah Abraham Kuyper[4] dan Hendricus van Kol[5] dari *Social Democratische Arbeid Partij*. Pemikiran Conrael Theodore van Deventer[6] dalam *de Gids* (1899) dengan triasnya; irigasi, edukasi, dan emigrasi, ternyata berpengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan (Jawa).

Tonggak kebijakan perubahan politik pemerintah kolonial Hindia Belanda tersebut terukir dalam pidato Ratu Wilhelmina (1901) berjudul *Ethische Rechting* (Hukum Etis), kebijakan politik ini lebih dikenal dengan sebutan politik etis atau politik paternalisasi atau perlindungan.[7]

Kebijakan baru dengan slogan van Deventer berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, berpusat pada banyak sektor, seperti perbaikan infrastruktur, pembangunan jalan, irigasi, peningkatan industri, kredit, dan pertanian. Langkah awal pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam menerapkan program etis ini adalah pengangkatan komite yang bertugas melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kondisi negeri jajahan, biasanya diikuti pula dengan pengangkatan pakar yang berkompeten dalam bidangnya.

Pandangan umum yang mengakar pada waktu itu adalah kesejahteraan pribumi sangat berkaitan dengan produksi tanaman pangan. Alasan tersebut menjadi dorongan kuat untuk melakukan perbaikan yang berfokus pada sektor pertanian.[8] Tindak lanjut dalam bidang pertanian adalah melakukan penelitian, pengawasan proyek dan usaha meningkatkan pemeliharaan tanaman pangan, kemudian pada tahun 1905 dibentuk pula Departemen Pertanian.[9]

Dibentuknya Departemen Pertanian tidak bisa lepas dari program Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Roosebοom, yang terus mengkhawatirkan tentang penurunan produk-produk pertanian beserta implikasinya terhadap penurunan kesejahteraan penduduk.[10] Departemen Pertanian dipusatkan di kebun botani di *Buitenzorg* (Bogor) dengan direktur M. Treub yang diberi kesempatan untuk merealisasikan rencana jangka panjangnya dalam upaya meningkatkan hasil pertanian tanaman padi di sawah, peningkatan tanaman sekunder, serta penanaman untuk lahan kering.

Selain itu, Treub juga menanamkan perlunya dorongan dan perkenalan industri-industri kecil pertanian, untuk itu dilakukannya penelitian terhadap kondisi klimatologi dan tanah di Jawa, serta pemeliharaan ternak.[11] Usaha Treub diimbangi dengan melakukan percobaan pertanian pada lahan-lahan di Jawa sebagai eksperimen.

Sumber yang diperoleh lahan-lahan percobaan (*demonstration fields*) juga dilakukan di daerah Kulon Progo.[12] Laporan Jr. A. Wulff pada tahun 1920-1926, misalnya, terlihat bahwa di daerah Pengasih dan Sogan dilakukan riset penanaman padi dengan menggunakan pupuk kimiawi pada lahan sawah basah.[13] Dan penelitian Wulff dilaporkan hasil dari percobaan ternyata kurang maksimal.

Pada tahun 1929 *Department Landbouw, Nijverheid en Handel* juga melakukan penelitian mengenai iklim dan tanah di wilayah Kulon Progo. Mengenai hal ini bisa dilihat dalam laporan J. J. Ochse pada tahun 1929 yang digunakan untuk penelitian pertanian tanaman pangan berupa buah-buahan, seperti mangga dan nanas.[14]

Selain dilakukan riset dalam bidang pertanian untuk meningkatkan transfer pengetahuan kepada penduduk pribumi, diangkatlah penasehat pertanian di Dinas Pertanian (1908). Pada tahun 1910, Dinas Pertanian diperluas dengan dikembangkannya *Landbouw Voorlichtings Dien*. Setelah dikembangkan maka para pakar pertanian diijinkan berhubungan langsung dengan penduduk pribumi.[15] Pada masa itu pemerintah kolonial Hindia Belanda juga berusaha melakukan perbaikan dalam bidang pendidikan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di Departemen Pertanian.

Kepemilikan Tanah dan Pajak

Penerapan politik etis yang lebih humanis berdampak pada perubahan birokrasi pemerintah kolonial Hindia Belanda,[16] beserta peraturan-peraturannya. Peraturan-peraturan baru itu mencakup urusan tanah yang merupakan faktor penting untuk kelangsungan kehidupan rakyat dan Kasultanan Yogyakarta sebagai kerajaan agraris.

Sistem perekonomian kerajaan, seperti Yogyakarta menempatkan Raja atau Sultan sebagai pemilik tanah beserta isinya, sedangkan rakyat (petani) sebagai abdi. Rakyat hanya mempunyai hak menggunakan atau menggarap lahan, sedangkan keluarga istana (bangsawan) beserta pegawai kerajaan secara teknis berhak atas kepemilikan mutlak raja, atau dengan kata lain dalam mengelola tanah raja dibantu oleh para pegawai-pegawai dan kerabat istana.

Tanah yang digunakan oleh raja sebagai salah satu bentuk keterikatan pegawai atau kerabat istana dengan pihak kerajaan, hat ini dapat dilihat dari kontraprestasi pegawai-pegawai kerajaan

(gaji) yang didasarkan oleh tanah.[17] Tanah digunakan sebagai gaji disebut tanah *apanage* atau *lungguh*.[18]

Patuh tinggal di Kuthanegara, sedangkan letak tanah *lungguh* di *Nagaragung*, karena jarak tersebut tanah-tanah *lungguh* dipercayakan kepada seorang *bekel*. Fungsi yang paling esensial dari seorang *bekel* adalah mengorganisir tanah *apanage* yang ada di wilayahnya agar mampu menghasiikan pajak.[19]

Untuk menghasilkan pajak, *bekel* mengerahkan tenaga petani dan memungut hasil pertanian. Imbalan yang diperoleh petani atas tenaga dan pajak mereka adalah sebidang tanah yang boleh ditempati petani di wilayah *kebekelan*.

Hak untuk mengatur hasil tanah disesuaikan dengan aturan, yaitu sistem *maron/paron* (1/2). Sebagai imbalan atas darma baktinya terhadap pengolahan tanah *lungguh*, *bekel* diberi kebebasan pajak sebesar 20% dari seluruh tanah yang mereka garap, untuk petani penggarap mendapat 40%, dan masing-masing 8% untuk demang, ngabehi dan bupati, seta 24% diperuntukkan untuk kas kraton (pajak).

Memasuki abad ke-20, perkembangan perusahaan gula sangat luar biasa. Melihat hal tersebut, pemerintah kolonial Hindia Belanda merasa perlu mengadakan kebijakan-kebijakan untuk mendukung dan mempermudah usaha tebu di daerah kerajaan, termasuk Yogyakarta.

Kepemilikan tanah dengan sistem tradisional seperti itu dianggap mempersulit perkebunan, misalnya saja ketika perusahaan perkebunan akan menyewa tanah, maka harus berhubungan dengan 60 orang *patuh*. Selain itu perkebunan juga harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang dijalankan oleh *patuh*,

seperti pajak kepada Sultan sebanyak dua kali dalam setahun, serta menyerahkan *bekti* (semacam persembahan uang atau upeti) dalam jumlah cukup besar.

Kewajiban-kewajiban tersebut dianggap memberatkan perkebunan, padahal di sisi lain perkebunan memberikan keuntungan besar terhadap perekonomian pemerintah kolonial Hindia Belanda. Menyikapi hal tersebut pemerintah kolonial Hindia Belanda mengadakan perubahan-perubahan mendasar mengenai kepemilikan tanah yang kemudian disebut dengan reorganisasi agraria.

Program reorganisasi agraria ini pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1912. Tujuan utama dari reorganisasi ini adalah penghapusan sistem *apanage*, pengaturan pajak tanah untuk pribumi dan perubahan peraturan sewa tanah.[20]

Penghapusan tanah-tanah *apanage* yang tidak disewakan mulai dilakukan pada tahun 1912 dan berakhir pada tahun 1915. Sedangkan untuk sawah-sawah yang disewakan kepada pihak perkebunan mulai dihapus pada tahun 1917 dan berakhir pada tahun 1925.[21] Penyesuaian-penyesuaian reorganisasi ini juga berimplikasi terhadap peran para *bekel* karena dengan dibentuknya desa, petani atau kuli harus memilih lurah/kepala desa sebagai pemimpin desa sehingga peran *bekel* secara tak langsung telah tersisih.

Petani yang sebelumnya hanya mempunyai hak memakai atas tanah atau hak *anggaduh*, setelah reorganisasi petani menjadi memiliki hak *andarbeni* atau hak milik atas tanah. Petani juga memiliki kesempatan untuk bekerja pada pihak perkebunan dengan menerima imbalan (upah).

Walaupun demikian, peraturan tersebut ternyata justru menimbulkan kegelisahan dari penduduk yang tinggal di daerah kasultanan karena dalam kenyataannya ketidakpastian hukum atas tanah penduduk masih banyak terjadi. Selain itu jabatan *bekel* pada perusahaan perkebunan bersifat sebagai kepala mandor, bukan lagi kepala desa.[22]

Dalam *Rijksblad* Kasultanan Yogyakarta (*Rijksblad van Djokjakarta*) 1918 tersebut dimuat pula tentang perubahan kepemilikan tanah dan kewajiban menyisakan 1/5 tanah desa dari tanah keseluruhan untuk digunakan sebagai tanah *lungguh* bagi lurah dan pamong, *bumi pangarem-arem* untuk bekas *bekel* dan sebagai penopang kebutuhan kelurahan. Diatur pula tentang hak petani untuk menyewakan tanahnya kepada pihak perkebunan serta dapat dipekerjakannya petani oleh perkebunan dengan mendapat upah.[23]

Menindaklanjuti perubahan-perubahan tersebut, pemerintahan lokal, yaitu Kadipaten Pakualaman dan Kasultanan Yogyakarta mengambil kebijakan tentang pajak bumi yang diatur dalam *Rijksblad van Djokjakarta* dan *Rijksblad van Paku Alam* tahaun 1919. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa bentuk tanah yang terkena beban pajak adalah sawah, tegalan (termasuk kolam ikan dan hutan nipah), halaman, dan kebun.

Bertugas sebagai penanggungjawab pajak adalah lurah desa dengan jumlah imbalan atas jasanya 8 rupiah dalam setiap 100 rupiah uang yang diterima. Besarnya pajak sawah yang dibebankan minimal 8% dan maksimal 20% dari hasil, tetapi perhitungan jumlah pajak juga disesuaikan dengan kondisi penduduk serta luas sawah/pekarangan. Untuk jumlah pajak tegalan dan pekarangan minimal 25 sen dan maksimal 20 rupiah.

Dalam kondisi tertentu, penduduk juga akan memperoleh keringanan pajak, seperti pada sawah yang tidak dapat ditanami padi dan baru mampu memproduksi padi pada tahun depan, maka hanya dibebankan pajak satu kali. Sedangkan sawah yang hanya ditanami palawija akan dibebaskan dan pajak kira-kira ½ dan maksimal ¾ dan jumlah palawija yang ditanami.

Khusus untuk tanah yang tidak dapat menghasilkan pertanian dibebaskan dari pajak. Ada pula jenis-jenis tanah yang terbebas dari pajak yaitu sawah yang masih baru, tanah tempat tinggal kepala desa, tanah desa, kuburan serta tanah *pangarem-arem* (pensiunan *bekel*).

Contoh kasus mengenai pajak bisa kita lihat di Distrik Pengasih dan Nanggulan di Kulon Progo pada tahun 1927. Pada tahun tersebut beban pajak sawah dan lahan kering Distrik Pengasih sebesar *f* 54.102, bebas tanggungan pajak sebesar *f* 7.544, maka total pajak hams dibayar hanya sebesar f 46.558. Berbeda dengan Distrik Nanggulan dengan beban pajak sawah dan lahan kering *f* 47.597, bebas tanggungan pajak sebesar *f* 6.131, maka total pajak yang harus dibayar hanya sebesar *f* 41 .466.[24]

Reorganisasi agraria juga berpengaruh terhadap beberapa kerja wajib yang harus dilakukan oleh penduduk Sewu Galur berhubungan dengan perkebunan, yaitu (1) *kerja wajib intiran* (*intiran* ialah aliran yang teratur, dalam hal ini adalah kerja wajib yang secara bergilir dalam waktu tertentu), setiap 5½ hari tanpa menerima bayaran; (2) *kerja wajib kerigan*, yang harus dilakukan satu kali dalam 35 hari; (3) *kerja wajib gugur gunung*, kerja wajib yang dilakukan pada saat terjadi bencana alam besar.[25]

Dalam hal ini peraturan-peraturan tentang pengerjaan tanah tidak diwajibkan adanya pembayaran ganti rugi apabila

seseorang terlambat dalam mengerjakan sawah yang menjadi tanggungannya. Satu-satunya peraturan mengenai hal ini dikeluarkan oleh residen pada tahun 1913 dan hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan perkebunan yang merasa dirugikan atas keterlambatan pengerjaan tanah. Beberapa perusahaan perkebunan sebenarnya sudah menerapkan ganti rugi keterlambatan tersebut secara sepihak. Penduduk sebetulnya merasa keberatan dengan peraturan di atas.[26]

Sistem dan Pola Pertanian

Bentuk-bentuk pengolahan lahan yang dikenal sampai abad ke-20 hingga sekarang adalah persawahan, perladangan kebun dan tegalan. Persawahan merupakan sebidang tanah garapan dengan dikelilingi *galengan* yang berfungsi menampung air, baik berasal dari sungai mata air atau air hujan. Pintu galengan dapat digunakan untuk mengontrol air di sawah.

Sawah biasanya dapat dipanen dua kali setahun.[27] Sawah dengan sumber air dari mata air atau air sungai disebut dengan sawah irigasi. Sedangkan untuk sawah dengan sumber air hujan lebih dikenal dengan sawah tadahan/tadah hujan.

Sawah irigasi biasanya dibangun dalam bentuk berteras untuk memudahkan aliran air, ditempat-tempat tertentu sawah irigasi dapat dilakukan bergilir setiap tahun. Sawah tadahan akan sangat bergantung pada musim hujan (November-April), dengan produk utamanya adalah padi basah.

Jenis sawah tadah hujan biasanya terdapat di lereng-lereng bukit berteras yang tidak dijangkau oleh aliran sungai. Sedangkan jenis sawah irigasi (*oncoran*) banyak memanfaatkan aliran sungai. Jenis sawah tadah hujan di Kulon Progo kelihatannya kurang di-

kembangkan apabila dilihat dari persentase penanaman selama bulan hujan yang jumlahnya sangat kecil.

Sistem persawahan untuk pertama kalinya muncul di tanah yang subur. Lahan persawahan ada di dalam dan di sekitar segi empat yang dibentuk oleh gunung-gunung: Sumbing, Sindoro, Merapi, dan Merbabu di leher yang sempit dari Pulau Jawa, yaitu di sepanjang Sungai Progo yang membentang ke selatan di lembah sungai Serayu dan dataran Sungai Luk Ulo serta Sungai Bagawanta di selatan Kebumen dan Purworejo.[28]

Ladang dan tegalan merupakan lahan kering yang tidak perlu digenangi air. Perbedaan formal antara ladang dan tegalan adalah produk utama ladang yang biasanya berupa padi gogo, sedangkan untuk tanah tegalan adalah palawija. Ladang biasanya dapat ditemukan di daerah yang agak tinggi dan tanpa irigasi atau curah hujan memadai. Tegalan yang digarap terus-menerus tidak akan menghasilkan panen lebih dan sekali dalam setahun, kecuali kalau digunakan pupuk tertentu.[29]

Berbeda dengan sistem sawah yang biasa digarap secara terus-menerus karena air irigasi mampu menjaga keseimbangan dan kesuburan tanah walaupun tanpa menggunakan pupuk jensi apapun. Ahli geografi Murphey mengemukakan bahwa, "… kesuburan tanah memang mempengaruhi hasil panen seperti halnya pemupukan—tetapi tanah itu kelihatannya tidak kehilangan daya hasilnya sekalipun lama tidak dipupuk, bahkan menjadi baik."[30]

Clifford Geertz kemudian menjelaskan bahwa tanah tropis yang tipis diatasi dengan menetralkan zat hara menggunakan air irigasi untuk menggantikan zat makanan yang diambil dan tanah dengan penambatan nitrogen oleh ganggang yang berkembang

baik di dalam air, termasuk sisa-sisa makanan yang sudah dituai yang tertinggal di dalam air. Maka dengan pengontrolan air yang balk padi dapat tumbuh dalam berbagai tipe tanah dalam berbagai iklim.[31]

Sawah mempunyai peran ekonomi penting di Jawa sebagai budidaya padi "basah", akan tetapi dapat pula digunakan untuk budidaya tanaman "kering" yang biasanya disebut sebagai palawija. Pada tahun 1920[32] luas lahan sawah di Kulon Progo mencapai 18.127 bau[33] dan pada tahun 1935[34] adalah 13.028 bau, sedangkan luas lahan kering pada tahun 1920[35] mencapai 24.560 bau menjadi 17.844 bau pada tahun 1935.[36] Dari keterangan tersebut dapat kita lihat bahwa di daerah Kulon Progo luas lahan kering[37] menunjukkan angka lebih (lebih luas) dari pada sawah.

Pengolahan sawah di Jawa secara umum dengan dibajak[38] menggunakan tenaga binatang (kerbau atau lembu) dan diairi hingga tanah menjadi lumpur kali, kemudian ditanami dengan tanaman padi muda tanpa menggunakan pupuk kimiawi.[39] Padi muda adalah bibit (benih) yang ditabur pada tempat pembenihan[40] sekitar satu bulan sebelum musim tanam tiba.

Penaburan benih dapat dilakukan dengan dua cara yang dikenal dengan *uritan* dan *sebaran*. Cara *uritan* yaitu butir-butir padi diletakkan berdampingan di atas tanah dan tangkainya ditancapkan ke dalam tanah, tanpa dilakukan pengolahan bibit terlebih dahulu. Tanpa dilakukan persemaian bibit langsung ditanam di sawah secara rapi dan berurutan (*urut*).

Sedangkan cara taburan dilakukan dengan cara menaburkan butir-butir gabah, sebelumnya butir-butir tersebut dilepaskan dari tangkai dengan cara menginjak-injaknya dengan kaki,[41]

kemudian bibit disemaikan dengan cara ditaburkan. Setelah bibit tumbuh dilakukan pemindahan (*transplatasi*) benih dan tempat pembenihan (*persemaian*) ke sawah dilakukan pada saat musim hujan. Lain halnya dengan cara penanaman padi gogo di mana tanah (tanpa digenangi air) setelah dibajak benih ditanam pada lubang-lubang yang telah dibuat atau disiapkan dengan menggunakan kayu atau tongkat.[42]

Padi sawah dan padi gogo secara umum ditanam pada butan November sampai dengan Februari, kemudian diikuti ketela dan jagung.[43] Tanaman padi dapat dilakukan dan diproduksi dua kali panen selama dua betas atau empat belas bulan. Pada bulan Februari lebih dari separo lahan ditanami padi sawah, padi gogo dan ketela.

Sekitar 10% lahan sawah ditanami tanaman lain dan 4/10 bagian ditanami jagung. Pada musim tanam kedua pada bulan Juni biasanya lebih dari separoh lahan ditanami *padi gadu* (padi yang ditanam pada musim kemarau) dan kedelai. Masa tanam ini berlangsung sampai dengan bulan September.

Adapun musim tanam untuk jagung tegalan adalah pada bulan April dan untuk jagung sawah pada bulan Agustus-September. Demikian pula dengan musim tanam untuk tanaman kacang-kacangan di mana yang pertama dilakukan pada bulan September dan yang kedua pada bulan Maret.[44]

Dilihat dari usia panen padi yang ditanam di sawah terdiri dari dua jenis, yaitu *padi genjah* dan *padi dalam*.[45] *Padi genjah* biasanya ditanam pada waktu musim hujan. Tanaman ini mempunyai keunggulan dapat dipanen dalam waktu cepat, setelah itu barulah dilakukan penanaman padi dalam yang memiliki keunggulan produksi yang maksimal dengan bulir-bulir padi yang lebih besar dan padat.[46]

Sedangkan penanaman padi di lahan kering (padi gogo) secara umum ditanam di daerah yang tidak mempunyai sistem irigasi yang baik. Selain itu, jenis padi gogo mempunyai masa panen relatif singkat, yaitu kurang dari empat bulan.

Pemupukan terhadap sawah jarang dilakukan, tetapi jerami yang dibakar di sawah itu dan ternak yang dibiarkan berkeliaran di sawah yang telah dipanen, serupa dengan pemupukan. Lebih lagi, kacang-kacangan ditanam sebagai tanaman kedua yang dalam kondisi menguntungkan merupakan sumber fiksasi nitrogen terkenal.[47]

Sumber yang ditemukan hanya menjelaskan bahwa pemupukan secara kimiawi hanya dilakukan di lahan percobaan milik pemerintah, dengan asumsi untuk mensosialisasikan penggunaan pupuk kimiawi kepada petani pribumi membutuhkan waktu yang relatif tidak singkat dan harga pupuk kimiawi belum tentu bisa dijangkau oleh petani.

Irigasi dilakukan dengan bantuan air sungai dan anak sungai secara alami. Untuk menjalankan aktivitas pertanian daerah Kulon Progo sebagian besar memanfaatkan Sungai Progo sebagai irigasi. Pengairan Sungai Opak dan Progo menjadi perhatian pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masa politik etis, yang kemudian termaktub dalam *Rijksblad van Djogjakarta* no. 10 tahun 1922, no. 20 tahun 1927, no. 23 dan 28 tahun 1928 dengan kebijakan membentuk dewan yang mengurus masalah distribusi air di wilayah Yogyakarta antara petani dan perkebunan.

Untuk pembagian air yang lebih terperinci antara petani satu dengan yang lain diserahkan kepada desa.[48] Untuk daerah perkebunan sistem pembagian air siang dan malam masih dipertahankan. Keperluan pengairan bagi petani baru akan diperoleh kalau sudah ada ijin dari perkebunan. Untuk keperluan

pengairan petani juga dipungut lurah. Pembagian siang malam sering menyebabkan konflik antar petani.[49] Untuk persoalan-persoalan yang timbul di kalangan petani dalam pembagian air biasanya dibantu oleh komisi-komisi tani yang dibentuk oleh pemerintah desa.

Sawah, selain digunakan untuk menanam padi di sepanjang musim kemarau biasanya dimanfaatkan untuk tanah tegal atau memproduksi tanaman kering, seperti tanaman jagung. Jagung merupakan varietas yang dapat ditanami hampir di setiap lahan. Selain jagung, tanaman pangan yang diproduksi, seperti ubi rambat, ketela (*convolvulus batatas*), kacang polong, dan jawawut.

Namun, sebatas sumber-sumber yang ditemukan hanya ada beberapa jenis tanaman pangan yang menjadi produksi pertanian di Kulon Progo, seperti padi sawah, padi gogo, jagung, ketela, ubi jalar, kacang, dan kedelai. Sedangkan untuk jenis tanaman perkebunan yang dibudidayakan di Kulon Progo adalah jenis tebu dan tembakau.

Berbeda dengan sawah, kebun tidak memerlukan pemeliharaan yang diperlukan sawah. Sistem kebun, hanya membutuhkan pengeringan tanah yang cukup baik dan jarak yang tidak jauh dari pasar.[50] Kebun dimanfaatkan oleh petani sebagai tambahan produksi subsistensi dengan jenis tanaman untuk satu masa tanam.

Lambat-laun, setelah masuknya kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Jawa, sistem kebun dibudayakan sebagai kebun permanen untuk tanaman ekspor dengan skala besar. Kondisi ini kemudian digambarkan oleh Boeke dalam istilah ”dualisme ekonomi”,[51] yang mana sektor ekonomi Timur yang tradisionalis harus berdampingan dengan sektor ekonomi Barat.

Konsep Boeke ini kemudian diadopsi oleh Geertz yang diperjelas lagi dengan dampak (polemik) berdampingannya pertanian tanaman ekspor dan tanaman pangan. Penjelasan Geertz ini memang cukup beralasan, sebagai permisalan adalah yang terjadi di daerah *Onderdistrik* Wates dan Panjatan. Di daerah tersebut pada tahun 1882 didirikan perkebunan tembakau dan tebu dengan nama *Sumbernila*.[52]

Namun, perkebunan ini tidak dapat bertahan lama. Pada tahun 1892 perusahaan ini dibubarkan karena memiliki hutang sebesar *f.* 750.000, kepada *Internationale Crediet en Handelsvereenging Rotterdam*. Sebelum dibubarkan, di daerah perkebunan ini pernah diberlakukan sistem *glondong*. Daerah tersebut adalah sebuah *kebekelan* seluas 10 bau, sebelumnya 8 bau digarap oleh 10 kuli. Tanah tersebut harus membayar pajak dalam bentuk padi dan palawija.

Setelah perkebunan dibubarkan, ternyata tanah garapan dan 10 orang kuli tersebut yang sebesar 8 bau tidak mungkin dapat ditanam secara bergantian dengan tebu karena banyaknya tenaga perawatannya yang dibutuhkan. Para kuli akhirnya hanya mendapat bagian (*iring*) seluas ½ bau. Bagian ini setengahnya pun harus ditanami tebu sebagai tanaman wajib. Kemudian ¼ bau tetap menjadi hak penduduk. Dari luas tanah 10 bau maka 2 bau merupakan jatah untuk *bekel* dan 5 bau merupakan bagian untuk kuli. Sisanya 3 bau disebut *siti glondongan*.[53]

Tanah ini oleh bekel kemudian disewakan kepada perkebunan. Pada saat perkebunan membutuhkan, maka *bekel* menyewakan seluruh tanah seluas 8 bau tersebut. Kondisi ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa sistem perkebunan telah menggeser lahan pertanian pribumi. Akan tetapi, tampaknya petani lebih senang menanam tanaman pangan.

Polemik yang disebabkan dengan berdampingannya tanaman subsistensi dan perkebunan dapat kita lihat pula pada sistem pembagian air. Ternyata pemenuhan kebutuhan pengairan hanya dipenuhi oleh perkebunan meliputi seluruh Distrik Galur saja.

Untuk mendapat air guna keperluan di luar perkebunan menjadi tanggung jawab petani dalam bentuk kerja wajib *keringan*. Tentu saja dalam hal ini petani tradisional yang harus menyesuaikan dengan segala kebijakan-kebijakan kerajaan maupun pemerintah Hindia Belanda. Sekitar tahun 1925, perkebunan tembakau masih ditemui di daerah Kulon Progo tepatnya di distrik Sentolo dan Lendah, walaupun dalam skala kecil.[54]

Sistem penanaman tanaman ekspor dan tanaman subsistensi yang dilakukan di Kulon Progo adalah tanaman tebu yang umurnya tidak lebih dari ½ tahun waktu pemanenannya, ditanam sesudah panen padi kedua kalinya. Keuntungan dari sistem ini adalah tidak terdapat kesulitan dalam pengumpulan hasilnya.[55]

Tentang perjanjian sewa-menyewa tanah bangsa Eropa dan pribumi untuk keperluan perkebunan diatur dalam *Rijksblad van Djogjakarta No. 2* tahun 1925. Dalam *Rijksblad van Djogjakarta* tersebut dijelaskan bahwa sewa-menyewa diatur perjanjian antara residen dan pemerintah lokal (pribumi) dengan syarat perkebunan tidak mengganggu pertanian pribumi, termasuk dalam hal pengairan.

CATATAN AKHIR BAB 2

1. Gagasan sistem tanam paksa (1830-1870) oleh Johanes van den Bosch bertujuan untuk mengatasi beban utang luar negeri Belanda dengan menggalakkan tanam paksa.

2. Pelaksanaan Undang-undang Agraria merupakan bentuk antisipasi Pemerintah Hindia Belanda agar lahan penduduk (pribumi) tidak beralih ke penanam Eropa dan penyewa tanah Cina, atau dengan kata lain penduduk pribumi diberikan bukti perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah dan hak milik tanah oleh pemerintah (tanah-tanah yang tidak digarap oleh penduduk atau tanah Bero), Lihat: Yujiro Hayami dan Masao Kikuchi, *Asian Village Economy at the Crossroads: An Economic Approach to Institutional Change*, Japan: University of Tokyo Press, 1981, hlm. 150; Mubyarto, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian sosial Ekonomi,* Yogyakarta: Aditya Media, 1992, hlm. 36-37.

3. Laporan-laporan pemerintah Hindia Belanda tentang merosotnya kesejahteraan rakyat disebut dengan *midere welvaart.* Soetandyo Wignjosoebroto, *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda: Kebijakan dan Upaya sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940).* Malang: Bayumedia, 2004, hlm. 29.

4. Abraham Kuyper melancarkan kritik-kritiknya terhadap kebijakan kolonial liberal yang dituangkan pada *Ons Program* (1879). Menurut Kuyper, orang-orang pribumi masih dalam taraf pertumbuhan anak-anak, karena itu harus ditaruh di bawah pengasuhan (*voogdij*) dan dididik di bawah tuntunan dan disiplin keras orang Eropa yang berpendidikan tinggi agar kelak urusan tanah Hindia Belanda dapat diurus oleh anak-anak pribumi sendiri, *ibid.*, hlm.31.

5. Hendricus van Kol memandang kesejahteraan pribumi baik perkembangan jasmani maupun kecerdasan moral orang-orang pribumi harus dijadikan tujuan utama politik pemerintah kolonial Belanda. Orang-orang pribumi harus dididik dalam suatu pengasuhan yang bijak agar kelak mandiri, *ibid.*

6. Conrad Theodore van Deventer mengemukakan bahwa eksploitasi atas tanah jajahan di masa lalu harus dianggap. Sebagai utang budi sekaligus juga hutang kehormatan, bangsa Belanda yang harus segera dikembalikan kepada rakyat (pribumi) untuk memperbaiki taraf hidup mereka, *ibid.*

7. Dalam sistem politik etis, rakyat (pribumi) dianggap sebagai objek dari pada partisipan aktif dalam pemerintahan (Dharmono, "Politik Kolonial Belanda, Antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, dalam *Lembaran Sejarah,* No. 8, Yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, 1976, hlm. 38).
8. Ge Prince, "Kebijakan Ekonomi di Indonesia 1900-1942", dalam J. Thomas Lindblad (ed.), *Sejarah Ekonomi Indonesia sebagai Tantangan Baru*, terjemahan M. Arief Rohman dan Bambang Purwanto, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*, Jakarta: LP3ES, 1998, hlm. 159.
9. Cruetzberg, "Ekonamisch Beleid II", dalam Ge Prince, *Kebijakan Ekonomi di Indonesia 1900-1942*" dalam J. Thomas Lindblad (ed.), *ibid*.
10. Gubernur Jenderal Rooseboom menulis surat kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan atas kekhawatirannya tersebut, Cruetzberg, *ibid*., hlm. 246.
11. Lihat Cruetzberg, *ibid*.,hlm.247.
12. J. E. Jasper, *Memoie van Overgave*, 1929, hlm. 111. No. 7e (Arsip Nasional Republik Indonesia).
13. A. Wullf, *Mededeelingen van het Algemeen Rpoefstation voor den Landbouw,* No. 25, Dukkerij-Buitenzoro, 1927, hlm. 2274-277 (Arsip Dinas Pertanian Yogyakarta)
14. J. J. Ochse, *Mededdeling voor den Dienst: Overzicht van Onderestammenproeven bij Vruchboomen*, Landsrukkerij: Weltevreden, 1929, hlm. 11-13.
15. Lihat Cruetzberg, *op. cit*, hlm.159.
16. Tentang perubahan birokrasi yang berlaku di Kulon Progo pada masa politik etis lihat Bab II.
17. Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*,1991, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 29.
18. Besar kecilnya tanah *lungguh* diberikan oleh raja sesuai dengan pangkat dan jabatan seseorang.
19. Suhartono, *Agroindusrti dan Protes Petani di Yogyakarta* (1850-1920), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1991, hlm. 21.

20. A. Jonkers, *Nota de Agrarische Hervorging en Economische Wedrzaamheid in Koelon Progo en Adikarto*, t.t., hlm. 11.

21. Soekarto, Odememing dan Apanage: *Studi Tentang Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja di Yogyakarta*. Skripsi Sarjana Fakultas Sastra UGM, 1996, hlm. 125.

22. A. Jonkers, *op. cit.*, hlm. 45.

23. Lihat *Rijksblad van Djokjakarta* 1918.

24. H. H. De Coock, Memorie van Overgave dell II,1934, hlm. 336.

25. A. Jonkers, op. cit., hlm.44

26. Ibid.

27. Lihat Peter Boomgard, "Children of The Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java 1795-1990", terj. Monique Sosman & Koesalah Soebagyo Toer, *Anak Jajahan Negeri Belanda*, Jakarta: Djambatan, 2004, hlm.138.

28. Clifford Geertz, "Agriculture Involution", terj. S. Supomo, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologis di Indonesia*, Jakarta: Bharatara Karya Aksara,1976, hlm.43.

29. Lihat Boomgard, *op. cit.*, hlm. 138-139.

30. Murphey, 1957, dalam Clifford Geertz, *op. cit.*,hlm.30-31.

31. Clifford Geertz, *ibid.*, hlm. 37.

32. Moch. Tauchid, *Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia Jilid II*, Djakarta: Tjakrawala, 1953, hlm. 100-101.

33. 1 bau = 7096, 50 m^2, S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000, hlm. 103.

34. A. Jonkers , *op. cit.*, hlm. Lampiran.

35. Moch. Tauchid, *loc. cit.*

36. A. Jonkers , *loc. cit.*

37. Dari keterangan Thomas Stamford Raffles, *The History of Java*, London: Black, The Purbury and Allen, 1817, disebutkan bahwa sistem pertanian yang dikenal di Jawa adalah sistem sawah dan

tegalan, maka dalam karya tulis ini penyebutan lahan kering yang dimaksud adalah tegalan.

38. Dalam membajak secara umum digunakan alat yang disebut bajak *(waluku)*. Bajak terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian badan, batok, dan pengangannya. Biasanya dibuat dari bahan kayu jati dan besi. Selain bajak peralatan yang digunakan untuk pertanian adalah pacul digunakan untuk mencakul, tangkainya sebagai pegangan dibuat dari kayu dengan panjang sekitar 2,5 kaki, sedangkan mata pisaunya terbuat dari besi. *Arit* adalah pisau yang digunakan untuk membersihkan ladang. *Ani-ani* untuk menuai butir padi, (Thomas Stamford Raffles, *ibid*., hlm. 113).
39. *Ibid*., hlm. 114.
40. Tempat pembenihan merupakan lahan dengan ukuran kecil berupa tanah lembut sebagai alas bibit padi.
41. Sayogya dan W. Collier, *Budidaya Padi di Jawa*, Jakarta: Gramedia, 1986, hlm.33.
42. Thomas Stamford Raffles, *op. cit*.,hlm. 115.
43. C. W. Bagchus, *Maandgemiddelden en Bouwgrondoccupaties; per District van de Negen Belangijkste Inlandsche Landbouwgewassen op Java en Madoera in de jaren 1920 tot en met* 1925,Weltevreden: Landrukkerij, 1929, hlm. 134.
44. *Ibid*.
45. Padi *genjah* merupakan tanaman padi yang masa tanamnya berumur pendek, sedangkan padi dalam merupakan tanaman padi yang masa tanamnya berumur panjang.
46. Thomas Stamford Raffles, *op. cit.,* hlm. 120.
47. Boomgard, *op. cit*., hlm. 144.
48. J. E. Jasper, *Memorie van Overgave*, hlm. CCLXX-CCLXXI
49. Mubyarto, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi,* Yogyakarta : Aditya Media, 1 992, hlm. 442,
50. Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991, hlm. 20.

51. Lihat J. H. Booke, *The Interest of the Voiceless Far East: Introduction to Oriental Economics*, Leiden: Universitaire Pers, 1948, hlm.3-22.
52. Sebelumnya di daerah tersebut telah dibangun perusahaan perkebunan gula dan tembakau. Pengerjaan tanah dan perawatan tanaman diserahkan kepada penduduk dengan cara menyerahkan tembakau pada waktu panen kepada Raja. Atas penyerahan uang tersebut, penduduk memperoleh uang sesuai dengan harga pasaran tembakau. Akan tetapi karena kurangnya perawatan dan pemahaman tentang tanaman tembakau maka pada saat tanaman terserang penyakit, areal perkebunan menjadi rusak.
53. Pada model *siti glondongan* pada mulanya lahannya merupakan tanah yang sulit untuk ditanami (misal tanah rawa). Lambat-laun lahan ini berkembang dan lebih banyak penduduk yang tinggal di sini dengan membayar sewa. Sistem *glondongan* yaitu praktek sewa tanah secara ilegal yang biasanya disewakan oleh bekel kepada pihak perkebunan. Tanah yang disewakan bekel inilah kemudian disebut dengan istilah siti glondongan. A. Joikers, op. cit., hlm. 46.
54. C. W. Bagchus, *op. cit.,* hlm. 146.
55. A. Jonkers, *op.cit.,* hlm. 47.

Bab 3

Lahan Pertanian di Kulon Progo 1900-1930

Pertanian padi di sawah (*wet rice field*), merupakan produksi utama pertanian di Kulon Progo. Bahkan Kulon Progo merupakan daerah yang memiliki persentase lahan penanaman sawah padi terbesar untuk wilayah Yogyakarta. Hampir setiap distrik di Kulon Progo dapat ditemui jenis tanaman ini.

Area Garapan

Distrik Sentolo, misalnya, memiliki persentase terbesar penanaman padi sawah, yaitu sebesar 85-100% dari luas area/sawah yang ditanami, diikuti Distrik Sogan dengan persentase 70-85%, Brosot dan Nanggulan 55-70%, Galur 45-55%, dan terakhir adalah Distrik Kalibawang dan Pengasih dengan 35-45%.

Sedangkan untuk persentase luas sawah yang ditanami padi sawah dan luas sawah irigasi Distrik Nanggulan dan Kalibawang menempati persentase paling tinggi, yaitu 110-125%, Sogan dan Sentolo-sebesar 100-110%, Pengasih 90-100%, Brosot 80-90%, dan Galur 59-70%.

Di Distrik Kalibawang dan Nanggulan, meskipun persentase lahan yang ditanami padi sawah dari keseluruhan areal sawah menunjukkan jumlah paling kecil, tetapi hampir keseluruhan lahan di kedua distrik tersebut ditanami jenis padi sawah. Walaupun luas lahan kering di Kulon Progo lebih luas dari sawah irigasi akan tetapi besarnya persentase penanaman sawah irigasi lebih besar, hal ini dimungkinkan karena adanya aliran sungai, seperti Sungai Progo dengan daerah teras-teras subur yang tampaknya dimanfaatkan dengan maksimal.

Penanaman padi pada lahan kering, yaitu padi gogo di Kulon Progo kurang dibudidayakan oleh petani. Pada umumnya penanaman padi gogo merupakan salah satu tambahan pendapatan bagi petani di wilayah yang tidak mempunyai saluran irigasi yang baik.

Untuk daerah Kulon Progo, yaitu Distrik Sentolo dan Galur dilaporkan tidak terdapat tanaman padi gogo. Penanaman padi gogo terlihat ditanam di beberapa distrik dengan persentase cukup rendah. Distrik Kalibawang, Nanggulan, Pengasih, dan Sogan

hanya 0-3% dari areal yang ditanami padi gogo dan 0-6% dan keseluruhan luas sawah padi gogo (non irigasi).

Untuk Distrik Brosot, lahan yang ditanami jenis padi gogo justru menunjukkan persentase yang lebih besar, yaitu 9-12% dari areal yang ditanami dan 24-30% dari luas sawah non irigasi. Dari keterangan persentase, secara tidak langsung turut menunjukkan bahwa di Kulon Progo sistem pengairan (irigasi) lebih banyak dimanfaatkan oleh petani untuk menanam padi.

Lain halnya dengan jenis tanaman jagung (*mais*) yang memiliki jumlah persentase lahan penanaman lebih tinggi dibandingkan dengan penanaman padi gogo. Besarnya areal yang ditanami jenis tanaman jagung ini cukup beralasan, karena jenis tanaman jagung dapat ditanam pada semua jenis tanah, dapat pula digunakan sebagai tanaman bergilir, serta kondisi topografis yang sesuai dengan Kulon Progo, yaitu dengan curah hujan 100-125 mm tiap bulan dan suhu optimal 30^{o} sampai 32^{o} celcius. Selain itu, jenis tanaman jagung tidak membutuhkan banyak air.[1]

Jenis tanaman jagung terlihat muncul hampir di setiap distrik di Kulon Progo dengan jumlah persentase areal tanam yang berbeda-beda. Di distrik Kalibawang, misalnya, lahan yang ditanami tanaman jagung adalah 40-60% dari total lahan yang ditanami. Sedangkan di distrik Nanggulan 25-40%, Sentolo dan Pengasih sebesar 12-25%, Brosot 5-12%, serta Sagan dan Galur sebesar 0-5%.

Ubi kayu (*cassava*), juga merupakan jenis tanaman pangan yang banyak ditanam di Kulon Progo. Tanaman jenis ini berbentuk belukar dengan akar yang berumbi, dagingnya lebat, sedangkan umbinya kaya akan zat tepung dan kanji, dan juga

mengandung bau yang tajam.[2] Ubi kayu dapat dipanen setelah enam bulan, tetapi setelah lebih dari enam bulan pun masih dapat dipanen.[3]

Habitat ubi kayu cukup mudah, lahan penanamannya tidak membutuhkan jenis tanah dengan memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan tidak membutuhkan banyak air. Di Distrik Pengasih, Nanggulan dan Kalibawang lahan yang ditanami ubi kayu sebesar 35-50% dari luas lahan yang ditanami, sedangkan di Sentolo dan Brosot sebesar 913%, dan 0-5% untuk Distrik Sogan dan Galur.

Jenis tanaman yang hampir serupa dengan tanaman ubi kayu adalah ubi jalar (*bataten*). Salah satu nilai lebih dari ubi kayu adalah kandungan kalori yang cukup tinggi, selain itu masa tanam ubi jalar tidak telalu lama, yaitu sekitar 4,5 sampai 6 bulan. Kendati demikian, persentase luas lahan yang ditanami ubi jalar di Kulon Progo jauh di bawah ubi kayu yaitu 7-10% di Distrik Nanggulan, 4-7% di Distrik Sentolo, dan 8-2% di masing-masing Distrik Pengasih, Kalibawang, Sogan, Galur dan Brosot.

Tanaman kacang tanah (*aardnote*) yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman tumpang sail, terlihat kurang dibudidayakan oleh petani di Kulon Progo. Padahal jenis tanaman ini memiliki resiko kegagalan panen yang cukup rendah dan masa panen cukup singkat. Wilayah Kulon Progo yang terbesar ditanami jenis tanaman kacang tanah adalah Distrik Sogan 12-20%, disusul kemudian Distrik Galur dan Brosot 8-12% dan 1-3% untuk masing-masing Distrik Pengasih, Sentolo, Nanggulan dan Kalibawang.

Akan tetapi, sepertinya petani di Kulon Progo lebih suka Jenis tanaman kacang kedelai. Hal ini bisa dilihat dari persentase

penanaman kedelai yang lebih besar dari kacang tanah. Terlihat bahwa Distrik Sentolo mempunyai persentase tertinggi untuk lahan yang ditanami jenis kedelai yaitu 14-19%. Distrik Brosot 10-14%, Pengasih, Sogan dan Galur 6-10%, Nanggulan 3-6% dan Kalibawang 0-3%.

Untuk jenis kacang-kacangan, selain kacang tanah dan kedelai ditanam pula di setiap Distrik di Kulon Progo. Distrik Sogan memiliki persentase luas areal yang ditanami jenis kacang-kacangan terbesar yaitu 8-13%, Galur 4-8%, Pengasih dan Nanggulan 2-4%, Sentolo dan Kalibawang 0-2%.

Dapat diketahui bahwa persebaran tanaman perkebunan (tembakau) di Kulon Progo menunjukkan jumlah rata-rata areal yang ditanami tembakau di setiap distrik hampir sama, yaitu sebesar 0-2% untuk masing-masing Distrik Sentolo, Nanggulan, Kalibawang, Sogan, dan Galur. Untuk Distrik Pengasih rata-rata areal yang ditanam jenis tanaman tembakau menunjukkan jumlah paling besar, yaitu 2-4%.

LUAS SAWAH DAN LAHAN KERING YANG DITANAMI DI KULON PROGOTAHUN 1925 (DALAM BAU)

Distrik	Sawah	Lahan Kering	Total
Pengasih	2.496	4.336	6.832
Sentolo	2.768	355	3.823
Nanggulan	2.829	2.436	5.265
Kalibawang	3.017	6.653	9.670
Sogan	3.719	1.151	4.870
Galur	3.468	718	4.186
Total	**18.297**	**15.649**	**33.946**

Bagchus, C. W., *Maandgemiddelden en Bouwgrondoccupaties; per District van de Negen Belangijkste Inlandsche Landbouwgewassen op Java en Madoera in de jaren 1920 tot en met 1925*, Weltevreden: Landsdrukkerij, 1929., hlm. 114.

Pada tahun 1925 luas lahan sawah dan lahan kering yang ditanami di Kulon Progo masing-masing adalah 18.297 bau dan 15.649 bau. Untuk lahan garapan berupa sawah di Kulon Progo terluas terdapat di Distrik Sogan (3.719 bau) dan sawah tersempit terdapat di daerah Pengasih dengan total 2.496 bau. Sedangkan untuk lahan kering terluas terdapat di Distrik Kalibawang dengan total 6.653 bau sedangkan terkecil terdapat di Distrik Sentolo 355 bau (lihat tabel di atas).

Produksi Pertanian

Waktu panen terbesar terjadi pada bulan Maret sampai Juni, biasanya berupa tanaman pokok padi sawah dan padi gogo. Sedangkan panen kedua, berlangsung dari bulan Oktober sampai November untuk penanaman padi *gadu* di sawah. Panen raya untuk jagung tegalan jatuh pada bulan Februari dan untuk tanaman tegalan lainnya pada bulan Juli, sedangkan jagung sawah pada bulan Oktober.

Masa panen untuk ketela adalah pada bulan Agustus sampai dengan bulan September. Kacang tanah memasuki musim panen pada bulan November sampai Desember, kacang kedelai di panen terutama pada bulan Juni sampai Agustus, dan untuk

Luas Lahan Panen 1920-1925
(dalam bau)

Afdeeling	Rata-rata Luas Lahan yang Dipanen dan Gagal Panen dalam bau Tahun 1920-1925								
	Padi Sawah	Padi Gogo	Jagung	Ketela /Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kedelai	Kacang-kacangan	Tembakau
Yogyakarta	50.572	2.265	7.486	6.831	1.567	7.094	4.547	620	1.937
Kulon Progo	17.937	256	8.832	10.251	1.618	1.527	1.094	1.094	376
Gunung Kidul	8.271	28.310	8.529	11.809	270	2.556	139	1.391	1.129
Jumlah	76.780	30.831	24.847	28.891	3.455	11.177	8.877	3.105	3.447

Bagchus, C. W., *Maandgemiddelden en Bouwgrondoccupaties; per District van de Negen Belangijkste Inlandsche Landbouwgewassen op Java en Madoera in de jaren 1920 tot en met 1925*, Weltevreden: Landsdrukkerij, 1929., hlm. 133.

tanaman tembakau jatuh pada bulan Oktober sampai Desember. Kegagalan panen terbesar biasanya dialami oleh tanaman jagung dan padi sawah.[4]

Dibandingkan dengan keseluruhan tahan yang ditanami di *Afdeeling* Kulon Progo (sawah seluas 18.297 bau dan lahan kering 15.649 bau), dengan luas lahan yang dipanen dan gagal panen terlihat jenis padi sawah menduduki posisi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 52,8% dari lahan yang ditanami dan 98,0% dari luas sawah atau sebesar 17.937 bau. Sedangkan untuk jenis tanaman padi gogo adalah sebesar 52,8% dari total areal yang ditanami dan 98,0% dari luas sawah non irigasi atau sebesar 256 bau.

Sedangkan lahan yang dipanen dan gagal panen untuk tanaman jagung adalah sebesar 8.832 bau atau 26,0% dari areal yang ditanami, ketela pohon yaitu sebesar 10.251 bau atau 30,2%. Lahan yang dipanen dan gagal panen untuk tanaman ubi jalar menunjukkan jumlah yang lebih rendah daripada tanaman ketela pohon yaitu sebesar 1.618 bau atau 4,8% dari luas lahan yang ditanami.

Begitu pula dengan jenis kacang tanah dengan luas lahan yang dipanen dan gagal panen hanya 4,5% bau atau 1.527 bau dari luas lahan yang ditanami, kedelai 2.172 bau atau sebesar 6,4%, untuk jenis kacang-kacangan sebesar 1.094 bau atau 32% dari luas areal yang ditanami.[5]

Bukti lain yang menunjukkan kegagalan panen terbesar di Kulon Progo adalah jenis tanaman padi sawah dan jagung dapat dilihat pula pada laporan tahunan (*verslag*) pada tahun 1920-1921 di mana panen padi sawah, kacang, kedelai, dan tanaman perkebunan (tembakau) mengalami kenaikan cukup signifikan.

Panen dan Gagal Panen di Kulon Progo Tahun 1920-1921 (dalam bau)

Tahun	Padi sawah		Padi Gogo		Jagung		Ubi Kayu		Ubi Jalar		Kacang		Kedelai		Tembakau		Kacang-kacangan	
	Panen	Gagal	Panen	Gagal	Panen	Gagal	Panen	Gagal	Panen	Gagal	Panen	Gagal	Panen	Gagal	Panen	Gagal	Panen	Gagal
1920	15.971	1.226	367	-	10.487	515	1.2952	-	4.123	-	1.203	-	1.384	224	142	71	-	-
1921	15.681	311	61	-	3.389	44	7.260	9	2.341	-	1.616	-	1.411	-	287	-	57	-

Verslag van den Landbouwleeraar Betreffende het Ressort Djokjakarta-Oud Kedoe 1920- 1921, Batavia: Landsdrukkerij, 1923, hlm. 13

Produksi padi sawah mengalami kenaikan sebesar 625 bau, yaitu sebesar 14.745 bau pada tahun 1920 menjadi 15.370 bau pada tahun 1921.

Untuk kacang tanah mengalami kenaikan sebesar 413 bau, kedelai mengalami kenaikan sebesar 251 bau, sedangkan tanaman tembakau mengalami kenaikan sebesar 210 bau, yaitu dari 71 bau pada tahun 1920 menjadi 287 bau pada tahun 1921. Kenaikan produksi ini tidak lepas dari kondisi alam pada tahun 1921 dengan curah hujan yang lebih memadai daripada curah hujan pada tahun 1920.[6]

Kendati demikian, pada jenis tanaman tertentu mengalami penurunan produksi, seperti pada jenis tanaman padi gogo sebesar 306 bau, jagung dari 3.345 bau pada tahun 1920 menjadi 3.345 bau pada tahun 1921, ketela pohon dati panen 12.952 bau pada tahun 1920 menjadi 7.251 bau pada tahun 1921, sedangkan ubi jalar mengalami penurunan produksi sebesar 1782 bau.

Penurunan produksi di Kulon Progo pada tahun 1921 terjadi pada jenis tanaman tegal dan ladang (padi gogo, jagung, ketela pohon dan ubi jalar), besar kemungkinannya petani memanfaatkan curah hujan yang lebih baik dari pada tahun sebelumnya

1920 untuk mengoptimalkan sawah. Apalagi pada tahun-tahun ini (1920-1921) di seluruh Jawa dan Madura mengalami penurunan produksi.

Rata-rata panen padi sawah terus mengalami kenaikan dari 7.564 bau pada tahun 1916-1920 dari luas sawah irigasi menjadi 32.344 bau pada tahun 1920- 1925.[7] Kondisi serupa juga terlihat pada tanaman tembakau dengan kenaikan sebesar 1.103 bau, yaitu sebesar 853 bau (1916-1920) menjadi 1.958 bau (1920-1925). Tanaman kedelai juga mengalami kenaikan sebesar 1.386 bau.

Kondisi sebaliknya justru terjadi pada panen untuk jenis padi gogo yang mengalami penurunan sebesar 298 bau, yaitu dari sebesar 519 bau pada tahun 1916-1920 menjadi 298 bau pada tahun 1920-1925.[8] Penurunan produksi terjadi pula pada jenis tanaman jagung dan kacang-kacangan dengan jumlah 2.643 bau untuk jagung dan 1.115 bau untuk kacang-kacangan.

Dari sumber-sumber di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa produksi sawah padi mengalami kenaikan, hal ini cukup wajar mengingat produksi jenis tanaman ini menjadi makanan pokok penduduk Jawa. Terlebih lagi pada tahun 1911, pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan penggalangan penanaman padi untuk mencegah kekurangan pangan serta larangan ekspor beras.

Bahkan, pada tahun 1918 pemerintah memutuskan untuk mengambil-alih seluruh perdagangan beras dan memutuskan untuk membeli beras segera setelah panen.[9] Kebijakan ini kemudian dicanangkan dalam *Rijksblad van DjogJakarta* pada tahun 1919 No. 14 tentang larangan penimbunan tanaman pangan. Kebijakan tersebut tidak dapat dijelaskan secara mendalam karena minimnya sumber-sumber pendukung.

JUMLAH RATA-RATA PANEN PADI (DALAM PIKUL)

Distrik	Tahun	Padi Sawah	Padi Gogo	Total
Kulon Progo	1920	14.745	367	15.112
Kulon Progo	1921	15.370	61	15.431
Pengasih	1927	45.106	237.870	282.976
Nanggulan	1927	107.227	147.036	254.263
Galur	1925	51.614	72.062	123.676

H. H. De Cook, *Memorie van Overgave dell II*, 1934, hlm. 332; *Verslag van den Landbouwleeraar Betreffende het Ressort Djokjakarta-Oud Kedoe 1920- 1921*, Batavia: Landsdrukkerij, 1923, hlm. 13.

Jumlah produktivitas tanaman pangan belum mampu disuguhkan secara mendalam dan lengkap dikarenakan minimnya sumber yang diperoleh. Walaupun hampir seluruh jenis tanaman pangan pada tahun 1920-1921 mengalami peningkatan tetapi kondisi ini tampaknya jauh di bawah produksi normal.

Data yang diperoleh menyebutkan bahwa produksi sawah di Kulon Progo pada tahun 1920-1921 jauh di bawah produksi pada tahun sesudahnya yaitu 1927 di beberapa distrik di Kulon Progo. Buruknya produksi sawah pada tahun 1920-1921 juga dialami seluruh Jawa dan Madura yang mengalami kerusakan akibat penyakit dan hama.[10]

Dan berbagai keterangan sebelumnya dapat kita lihat bahwa walaupun luas lahan produksi padi gogo di Kulon Progo secara umum mengalami penurunan dan dalam skala yang lebih kecil dibanding padi sawah, akan tetapi basil panen padi gogo justru menunjukkan jumlah yang lebih besar daripada padi sawah.

Contoh kasus, di Distrik Pengasih jumlah panen padi gogo 237.870 pikul,[11] sedangkan panen padi sawah hanya 45.106 pikul. Demikian pula dengan Distrik Galur, jumlah panen padi gogo 72.062 pikul, sedangkan jumlah panen padi sawah lebih sedikit, yaitu 51.614 pikul.

Lain halnya dengan Distrik Nanggulan dengan jumlah panen padi sawah lebih besar daripada padi gogo, yaitu 107.227 pikul untuk padi sawah dan 147.036 pikul untuk padi gogo. Padahal bisa dilihat dari luas lahan yang ditanami padi sawah di Distrik Pengasih dan Galur menunjukkan persentase lebih besar dari pada Distrik Nanggulan. Jumlah hasil rata-rata panen padi kering di Kulon Progo pada tahun 122-1927 sebesar 24,12 pikul padi kering per bau atau sebesar 15,74 kuintal gabah per hektar.[12]

Jumlah rata-rata produksi padi per jumlah penduduk di Kulon Progo sebesar 1,75 pikul pada tahun 1919-1920.[13] Di lain pihak total produksi tanaman padi (beras) terus mengalami kenaikan di beberapa distrik Kulon Progo. Contoh kasus, bisa dilihat di Distrik Pengasih, total produksi padi dibagi jumlah penduduk, maka dengan asumsi perkembangan jumlah penduduk dan tahun 1920-1930 stabil, akan terjadi peningkatan jumlah padi per jumlah penduduk, yaitu sebesar 0,82 pikul pada tahun 1919-1920[14] menjadi 3,05 pikul pada tahun 1927.

Kondisi serupa juga terlihat di Distrik Nanggulan dengan jumlah 3,22 pikul pada tahun 1919-1920[15] menjadi 3,34 pikul pada tahun 1927. Lain halnya dengan kondisi Distrik Galur, yaitu sebesar 1,50 pikul pada tahun 1919-1920[16] menjadi 1,31 pikul pada tahun 1927. Penurunan jumlah produksi padi per jumlah penduduk di Distrik Galur cukup wajar mengingat laju pertumbuhan jumlah penduduk relatif lebih besar dibanding

distrik lainnya di Kulon Progo. Produksi pertanian padi di Kulon Progo tampaknya tidak terlalu buruk dibandingkan dengan produksi daerah lain.

Di Kulon Progo terjadi peningkatan tanaman pokok, dibarengi dengan tanaman komersial dan kepadatan penduduk secara bersama-sama, akan tetapi pendapatan perkapita penduduk Kulon Progo agaknya justru mengalami peningkatan, bila dilihat dari jumlah produksi padi dibagi jumlah penduduk, belum lagi ditambah jumlah produksi tanaman pokok lain, seperti jagung, ketela pohon, ubi jalar, kacang-kacangan, dan lainnya serta kegiatan industri dan kerajinan sebagai pekerjaan tambahan penduduk. Mengingat terbatasnya sumber-sumber yang digunakan dalam tulisan ini maka tidak akan disimpulkan lebih jauh tentang pendapatan perkapita penduduk Kulon Progo.

Catatan Akhir Bab 3

1. Suryatna Effendi, *Bercocok Tanam Jagung*, Jakarta: Proyek Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan, 1979, hlm. 311.
2. D. G. Stibbe dan J. Stroomberg , *Encyclopadie van Nederlandesh Indie III*, S. Gravehage Martinus Niyhoff, 1992, hlm. 71, dalam Haryono R., *Budidaya Ubi Kayu di Jawa 1910-1940*, Tesis S2 Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, l998, hlm. 56.
3. D. H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Jilid II*, Djakarta: Pradja Paramita, 1960, hlm. 78.
4. C. W. Bagchus*, Maandgemiddelden en Bouwgrondoccupaties; per District van de Negen Belangrijkste Inlandsche Landbouwgewassen, op Java en Madoera in de jaren 1920 tot en met 1925*, Wertevreden: Landrukkerij, 1929, hlm. 134.
5. C.W. Bagchus, *ibid*., hlm. 133.

6. *Verslag van den Landbouwleeraar Betreffende het Ressorf Djokjakarta-Oud Kedoe 1920-1921*, Batavia: Landsdrukkerij, 1923, hlm. 1.
7. C.W. Bagchus, *loc.cit*.
8. *Ibid*.
9. Kebijakan ini terkait pula dengan perdagangan beras di pasar internasional yang mengalami stagnasi. Lihat Ge Prince, ”Kebijakan Ekonomi di Indonesia 1900-1942”, dalam Thomas Lindblad (ed.), ”New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia: Proceedings of the First Conference on Indonesia’s Modern Economic Historf’, terjemahan M. Arief Rohman & Bambang Purwanto, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*, Jakarta: LP3ES, 1998, hlm.237-238.
10. Sayogya dan W. Collier, *Budidaya Padi di Jawa*, Jakarta: Gramedia, 1996, hlm.174-175.
11. 1 pikul (N. I) = 61, 7613 kg, J. van Gerderen, *Mededeelingen van het Statistisch Kantoor Bevolkingsdichtheid in Landbouw op Java*, Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1929, hlm. XXXIII.
12. *Ibid*., hlm. 181.
13. J. van Gelderen, *Mededeelingen van het Statistisch Kantoor: Bevolkingsdichtheid en Landbouw op Java, Depertement van Landbouw, en Handel.*, hlm, 12.
14. *Ibid*.
15. *Ibid*.
16. *Ibid*.

Bab 4

PENUTUP

Dalam bab-bab yang dibahas sebelumnya telah diungkapkan tentang kondisi umum Kulon Progo pada masa politik etis (1900-1930) yang sedikit banyak berimplikasi terhadap pertanian. Kondisi geografis dan topografis besar pengaruhnya terhadap produksi pertanian, kualitas produksi dan bentuk pertanian.

Dilihat dari kondisi geografis dan topografis serta waktu penanaman, maka bentuk pertanian yang berkembang di Kulon Progo adalah jenis sawah irigasi. Jenis sawah tadah hujan terlihat kurang berkembang dilihat dari persentase penanaman selama musim penghujan yang sangat kecil jumlahnya.

Berkembangnya pertanian sawah irigasi di Kulon Progo disebabkan air dapat dialirkan ke sawah-sawah, seperti dari Sungai Progo dan Bogowonto. Kondisi air yang baik untuk penanaman sawah irigasi mengakibatkan penanaman padi gogo di Kulon Progo kurang berkembang. Meskipun begitu, jenis tanaman tegalan juga dikenal di Kulon Progo, namun persentase penanaman tidak sebesar sawah irigasi. Hal ini bisa kita lihat dari luas penanaman lahan kering yang lebih kecil daripada penanaman sawah pada tahun 1925, yaitu sebesar 15.649 bau untuk lahan kering dan 18.297 bau untuk sawah.

Di lain pihak, jumlah penduduk, situasi politik, dan pemerintahan juga memberikan kontribusi terhadap pertanian, baik menyangkut sistem kepemilikan tanah maupun pajak yang diterapkan. Jumlah penduduk di Kulon Progo pada tahun 1920-1940 terus mengalami kenaikan.

Pada tahun 1912, perkembangan industri gula mempengaruhi beberapa kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda, seperti kebijakan reorganisasi dalam sektor agraria. Penyesuaian-penyesuaian lewat reorganisasi agraria tersebut juga berimplikasi terhadap petani. Petani yang sebelumnya hanya mempunyai hak memakai tanah, setelah reorganisasi memiliki hak milik atas tanah. Petani juga memiliki hak bekerja pada perkebunan dengan menerima upah.

Menindaklanjuti perubahan-perubahan tersebut, pemerintahan Kasultanan Yogyakarta pun mengambil kebijakan tentang pajak bumi berupa sawah, tegalan, halaman, dan kebun. Besarnya pajak yang dibebankan kepada petani suatu daerah (distrik) dengan daerah yang lain tidak sama karena berbagai penyesuaian dan situasi masing-masing distrik sebagai parameter perhitungan pajak.

Kebijakan politik etis dengan program irigasi, emigrasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda juga membawa pengaruh terhadap sektor pertanian, walaupun tidak bisa disimpulkan lebih jauh tentang besarnya pengaruh politik etis terhadap pertanian di Kulon Progo. Ambil contoh, misalnya, tentang irigasi teknis Sewu Galur yang digunakan untuk menjalankan aktivitas pertanian. Namun dari sumber-sumber yang ditemukan, irigasi hanya dimanfaatkan untuk petani Galur dan sebagian besar dimanfaatkan oleh pihak perkebunan, selain itu, untuk keperluan irigasi petani juga dikenakan beban pajak.

Pemupukan kimiawi yang merupakan salah satu usaha perbaikan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masa politik etis untuk meningkatkan kesejahteraan petani, sebatas sumber yang ditemukan hanya dilakukan pada lahan-lahan percobaan milik pemerintah. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan petani di Kulon Progo masih menggunakan pemupukan dengan cara tradisional, seperti harga pupuk yang tidak terjangkau (mahal) serta sosialisasi (kursus desa) terhadap petani membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Kondisi geografis dan topografis juga sangat berpengaruh terhadap masa tanam dan masa panen. Padi sawah dan padi gogo secara umum ditanam pada bulan November sampai Februari, kemudian diikuti ketela dan jagung. Pada musim tanam kedua, yaitu pada bulan Juni sampai September biasanya lebih dari separuh lahan ditanami padi gadu dan kedelai.

Musim tanam untuk jagung tegalan adalah bulan April dan untuk jagung sawah bulan Agustus sampai September. Demikian pula dengan tanaman kacang-kacangan, yang pertama pada bulan September dan yang kedua pada bulan Maret.

Waktu panen terbesar terjadi pada bulan Maret sampai Juni, biasanya berupa tanaman pokok padi sawah dan padi gogo. Sedangkan panen kedua, berlangsung dari bulan Oktober sampai November untuk penanaman padi gadu di sawah. Panen raya untuk jagung tegalan jatuh pada bulan Februari dan untuk tanaman tegalan lainnya pada bulan Juli, sedangkan jagung sawah pada bulan Oktober.

Masa panen untuk ketela adalah pada bulan Agustus sampai September. Kacang tanah memasuki musim panen pada bulan November sampai Desember, kacang kedelai di panen terutama pada bulan Juni sampai Agustus, dan untuk tanaman tembakau jatuh pada bulan Oktober sampai Desember

Beberapa jenis pertanian tanaman pangan yang berkembang di Kulon Progo antara lain: padi sawah, padi gogo, ketela, ubi jalar, kacang, dan kedelai. Untuk jenis tanaman perkebunan yang dibudidayakan adalah tembakau dan tebu. Kegagalan panen terbesar dialami oleh jenis tanaman padi sawah dan jagung. Sedangkan untuk persentase produksi pertanian atau hasil panen dialami oleh jenis tanaman padi sawah, kacang, kedelai, dan tembakau.

Di Kulon Progo terjadi peningkatan tanaman pokok, tanaman komersial dan kepadatan penduduk secara bersama-sama. Akan tetapi pendapatan perkapita penduduk Kulon Progo agaknya justru mengalami peningkatan, bila dilihat dari jumlah produksi padi per jumlah penduduk, kegiatan industri dan kerajinan sebagai pekerjaan tambahan penduduk. Mengingat terbatasnya sumber-sumber yang digunakan dalam tulisan ini maka tidak akan disimpulkan lebih jauh tentang pendapatan perkapita penduduk Kulon Progo.

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang memfokuskan pada pertanian untuk kesejahteraan rakyat memberikan gambaran bahwa pada saat ini agro industri merupakan salah satu industri yang masih mungkin di Indonesia dalam persaingan global. Lebih lagi kondisi alam dan iklim di Indonesia sangat mendukung, teknologi yang tidak terlalu mahal serta usaha ini cenderung melibatkan banyak pihak seperti petani dan usaha kecil (padat tenaga kerja). Namun, di sini kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian hendaknya disesuaikan dengan kondisi petani atau dari dan oleh petani.

Daftar Pustaka

BUKU

Best,W., John "Research in Education", terj. Sanapiah, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Burger, D. H., *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Jilid II*, Djakarta: Pradja Paramita

Boomgard, Peter, "Children of The Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java 1795 - 1880, terj. Monique Sosman & Koesalah Soebagyo Toer, *Anak Jajahan Negeri Belanda*, Jakarta: Djambatan,2004.

Booke, J. H., *The Interest of the Voiceless Far East: Introduction to Oriental Economics*, Leiden : Universitaire Pers Leiden, 1948.

Daliman, A., *Sejarah Indonesia Abad XIX-awal XX: Politik Kolonial dan Sistem Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda*, Diktat Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta , 2001.

Dharmono, Politik *Kolonial Belanda antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II*, Lembaran Sejarah No 8, Yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, 1976.

Djoko Suryo, *Sekitar Masalah Kemiskinan di Pedesaan pada Masa Pemerintah Kolonial*, Yogyakarta: P3PK UGM, 1992.

Dr. Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Elsbether-Locher-Scholten, "Ethiek Infragmenten, vijf studies over Kolonial en doen van Nederlanders in de Indonesische Arcipel 1877-1942", terjemahan Nicolette P. Ratih dan Th. van den End , *Etika yang Berkeping-keping: Lima Telaah Kajian Aliran Etik dalam Politik Kolonial 1877-1943*, Jakarta: Djambatan, 1996.

Ensiklopedi Indonesia 4, Djakarta: Ictiar Baru, t.t.

Geertz, Clifford., "Agriculture Involution", terjemahan S. Supomo, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologis di Indonesia*, Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1976.

Gottschalk, Louis, "Understanding History: A primer Historical Methode", terjemahan Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Universitas Indonesia, Press, 1975.

Haryono R., *Budidaya Ubi Kayu di Jawa 1910-1940*, Tesis S2 Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1998.

Hellet Carr, Edward, *What is History*, New York: Alfred A. Knopf, 1965.

Kaslan A. Tohir, *Seputar Pengetahuan Tentang Usaha Tani Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Lindblad, J. Thomas (ed.), "New challenges in the Modem Economic History of Indonesia: Proceedings of The First Conference on Indonesia's Modern Economic History", terjemahan M. Arief Rohman & Bambang Purwanto, Sejarah *Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*, Jakarta: LP3ES, 1998.

Masao Kikuchi, Hayami, *Asian Village Economy at the Crossroads: An Economic Approach to Institutional Change*, Japan: University of Tokyo Press, 1981.

Maarten, Timmer, *Child Mortality and Population Pressure in The D.I. Jogjakarta, Java, Indonesia*, Rotterdam: Bronder-Offset, 1961.

Mubyarto, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan*, Kajian Sosial Ekonomi, Yogyakarta: Aditya Media, 1902.

Mohammad Hatta, *Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi*, Jakarta: Fasco, 1957.

Moch. Tauchid, Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia Jilid Il: Djakarta: Tjakrawala, 1953,

Monografi Daerah Istimewa Yogyakarta, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan-Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, t.t.

Nugroho Notosusanto, *Norma-norma dan Penulisan Sejarah*, Jakarta: Dephankam, 1971.

Profil Republik Indonesia, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yayasan Bakti Nusantara.

Raffles, Th., *The History of Java*, London; Black, The Purbury and Allen, 1917.

Sartono, Kartodirdjo dan Djoko Suryo*, Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991 .

Sayogya dan W. Collier, *Budidaya Padi di Jawa*, Jakarta: Gramedia, 1986.

Scott, James C., *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Suhartono, *Agroindustri dan Protes Petani di Yogyakarta (1850-1920),* Laporan Penelitian Universitas Gadjah Mada, 1991.

__________, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920, 1991*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Suryatna Effendi, *Bercocok Tanam Jagung*, ttp. : Proyek Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan 1979.

Soedarisman Poerwokoesoemo, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984.

Soekarto, *Odememing dan Apanage: Studi Tentang Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja di Yogyakarta*. Skripsi Sarjana Fakultas Sastra UGM, 1996.

Soekardi Wisnubroto dkk., *Asas-asas Meteorologi Pertanian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Soetandyo Mignyosoebroto, *Desentralisasi dalam Tata-pemerintahan Kolonial Hindia Belanda: Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (l900-1940)*, Malang: Bayumedia, 2004.

Tim Penyusun Kantor Statistik BPJ, *Statistik Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta l990-1994*, Propinsi Daerah Yogyakarta, 1944.

Widjojo Nitisastro dan Nathan Keyfitz, *Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia*, Djakarta: Pembangunan, 1955.

Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,2000.

ARSIP DAN LAPORAN

Bagchus, C. W., *Maandgemiddelden en Bouwgrondoccupaties; per District van de Negen Belangijkste Inlandsche Landbouwgewassen op Java en Madoera in de jaren 1920 tot en met 1925*, Weltevreden: Landsdrukkerij, 1929.

De Cook, H. H., *Memorie van Overgave dell II*, 1934.

Gilderen, J. van., *Mededeelingen van het statistich Kantoor: Bevolkingsdichtheid en Landbouw op Java*, Depertement van Landbouw, Nijverheid en Handel.

___________*Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indie: Statistical Abstract for the Netherlands East-Indies*, 1928.

Inheemsche Bevolking van Oost Java: Census of 1930 Innetherlands India Vostelling 1930 deel III, Batavia: Landsdrukkerij, 1934.

Jasper, J. E., *Memorie van Overgave*, 1929, No. 7e (Arsip Nasional Republik Indonesia).

Jonkers. A., *Nota De Agrarische Hervorging En Economische Werkzaamheid in Koelon Progo En Adikarto*, t.t,. Nederlandsch-Indie Der In De Maand November 1920 Gehouden Votkstelling, 1934.

Laporan J. C. van Hoeven, 14 Oktober 1941 (Arsip Paku Alam No.3946).

Laporan Pangeran Adipati Ario, Djogjakarta, 2l September 1928 No. 4434/144.

Nederlandsch-Indie der In de Maand November 1920 Gehouden Volks-telling, 1934.

Ochse, J. J., *Overzicht van Onderstammenproeven bij Vruchtboomen, Weltevreden* : Landsdrukkerij, 1929.

Rijksblad van Djokjakarta 1918 No. 16.

Rijksblad van Djokjakarta 1919 No. 10.

Rijksblad van Djokjakarta 1927 No. 9.

Rijksblad van Djokjakarta 1935 No.2.

Rijksbladvan Paku Alam 1919 No. 14.

Van Bemmelen, W., Result of Rainfall Observatins in Java, Batavia: Javasche Boekhandel & Drukkerij, 1914.

Verslag van den Landbouwleeraar Betreffende het Ressort Djokjakarta-Oud Kedoe 1920- 1921, Batavia: Landsdrukkerij, 1923.

Wulff, A., *Mededeelinge van het Algemeen Proefstation voor den Landbouw No. 25 Bemestingsproeven 1920-1926*, Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel.

Lampiran

Jumlah Penduduk Kulon Progo Tahun 1920

Subdistrik	Penduduk Asli			Eropa dan Keturunan Eropa			Cina			Total		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Galur	9. 740	10. 054	19. 794	25	21	52	54	36	90	9. 819	10. 111	19. 930
Panjatan	12. 540	13. 144	25. 684	5	1	6				12. 545	13. 145	25. 690
Temon	8. 170	8. 664	16. 834	10	5	15		1	1	8. 180	8. 670	16. 850
Wates	11. 977	12. 560	24. 537	9	8	17	90	76	166	12. 076	12. 644	24. 720
Distrik Adikarto	42. 427	44. 422	86. 849	49	35	90	144	113	257	42. 620	44. 570	87. 190
Lendah	8. 365	8. 595	16. 960							8. 365	16. 960	25. 555
Pengasih	9. 371	9. 437	18. 808				3	1	4	9. 374	9. 438	18. 812
Sentolo	7. 494	7. 790	15. 284	3	3	6	17	21	38	7. 514	7. 814	15. 328
Sermo	6. 432	6. 494	12. 926							6.432	6. 494	12. 926
Distrik Pengasih	31. 662	32. 316	63. 978	3	3	6	20	22	42	31. 685	32. 341	64. 026
Kalibawang	6. 089	6. 437	12. 526							6. 089	6. 437	12. 526
Nanggulan	4. 713	4. 875	9. 588	1		1				4. 714	4. 875	9. 589
Samigaluh	6. 033	6. 001	12. 034							6. 033	6. 001	12. 034
Watumurah	4. 465	4. 559	9. 024				7	1	8	4. 472	4. 560	9. 032
Distrik Nanggulan	26. 792	27. 623	54. 415	1		1	7	1	8	26. 801	27. 625	54. 426

Sumber: *Inheemsche Bevolking van Oost Java: Census of 1930 Innetherlands India Vostelling 1930 deel III*, Batavia: Landsdrukkerij, 1934, hlm. 28.

Kulon Progo

Sumber: Diolah dari C. W. Bagchus, *Maandgemiddelden en Bouwgrondoccupaties: per District van de Negen Belangrijkste Inlandsche Landbouwgewassen op Java en Madoera in de jaren 1920 tot en met 1925,* Weltevreden: Landrukkerij, 1929, hlm. 138.

Persentase Luas Lahan Garapan Padi Sawah dari Areal yang Ditanami

Sumber: C. W. Bagchus, *Maandgemiddelden en Bouwgrondoccupaties; per District van de Negen Belangrijkste Inlandsche Landbouwgewassen op Java en Madoera in de jaren 1920 tot en met 1925*, Weltevreden: Landrukkerij, 1929, hlm. 138.

Persentase Luas Lahan Garapan Jagung dari Areal yang Ditanami
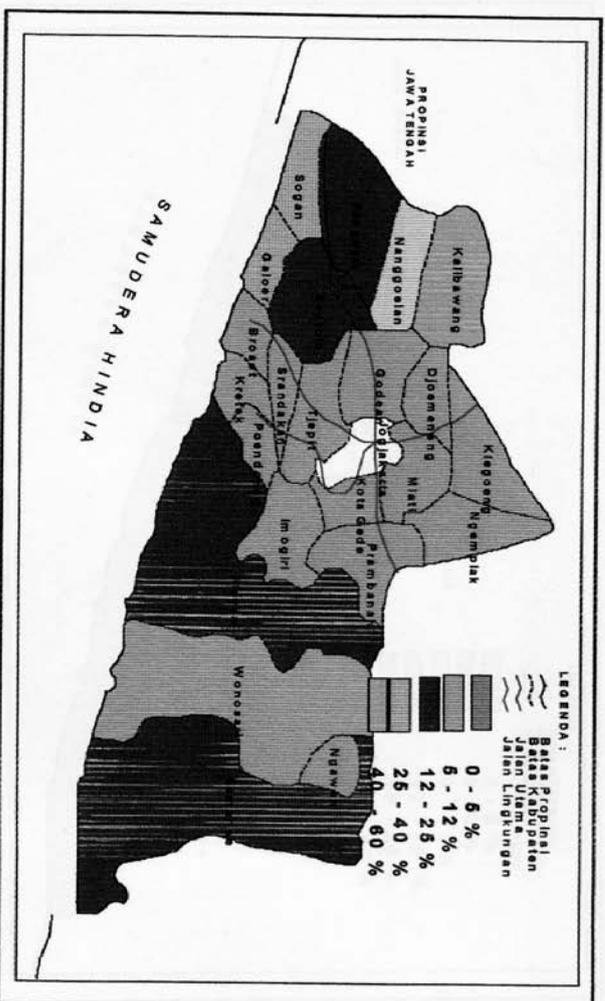
Sumber : C. W. Bagchus, *Maandgemiddelden en Bouwgrondoccupaties: per District van de Negen Belangrijkste Inlandsche Landbouwgewassen op Java en Madoera in de jaren 1920 tot en met 1925*, Weltevreden: Landrukkerij, 1929, hlm. 138.

Persentase Luas Lahan Garapan Ubi Kayu dari Areal yang Ditanami
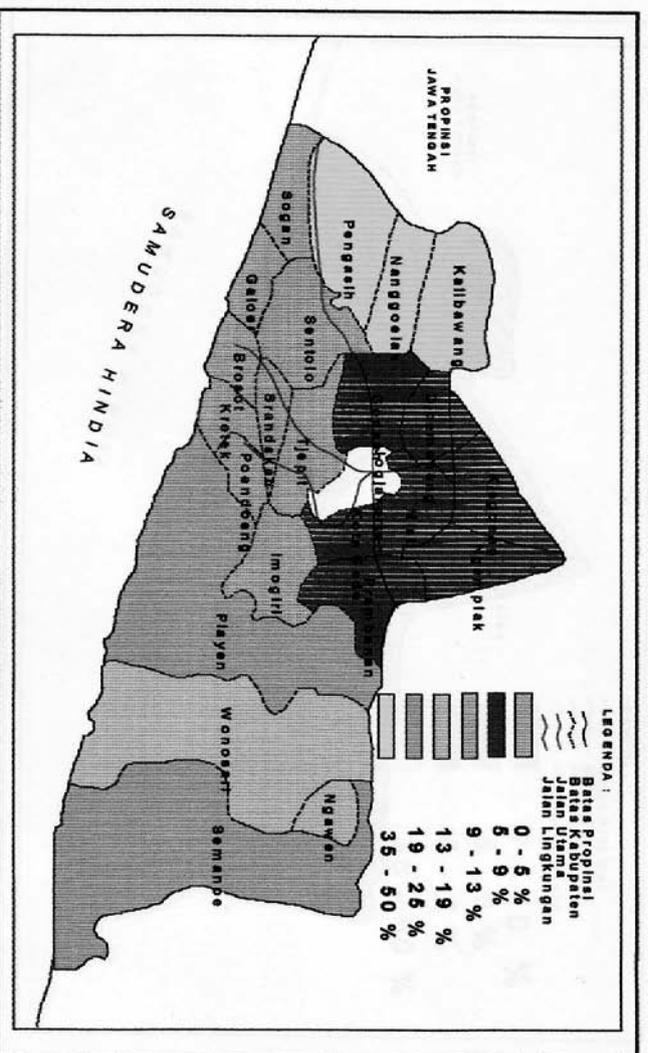
Sumber : C. W. Bagchus, *Maandgemiddelden en Bouwgrondoccupaties: per District van de Negen Belangrijkste Inlandsche Landbouwgewassen op Java en Madoera in de jaren 1920 tot en met 1925*, Weltevreden: Landrukkerij, 1929, hlm. 138.

Persentase Luas Lahan Garapan Ubi Jalar dari Areal yang Ditanami

Sumber : C. W. Bagchus, *Maandgemiddelden en Bouwgrondoccupaties: per District van de Negen Belangrijkste Inlandsche Landbouwgewassen op Java en Madoera in de jaren 1920 tot en met 1925*, Weltevreden: Landrukkerij, 1929, hlm. 138.

Persentase Luas Lahan Garapan Kacang Tanah dari Areal yang Ditanami
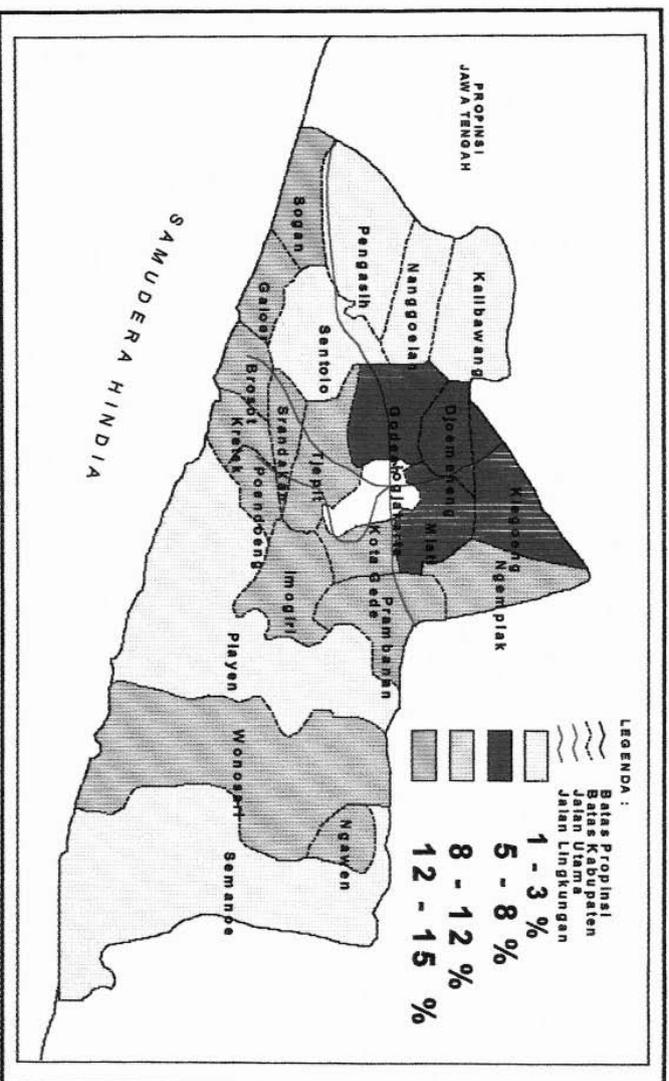
Sumber : C. W. Bagchus, *Maandgemiddelden en Bouwgrondoccupaties: per District van de Negen Belangrijkste Inlandsche Landbouwgewassen op Java en Madoera in de jaren 1920 tot en met 1925*, Weltevreden: Landrukkerij, 1929, hlm. 138.

Persentase Luas Lahan Garapan Kedelai dari Areal yang Ditanami
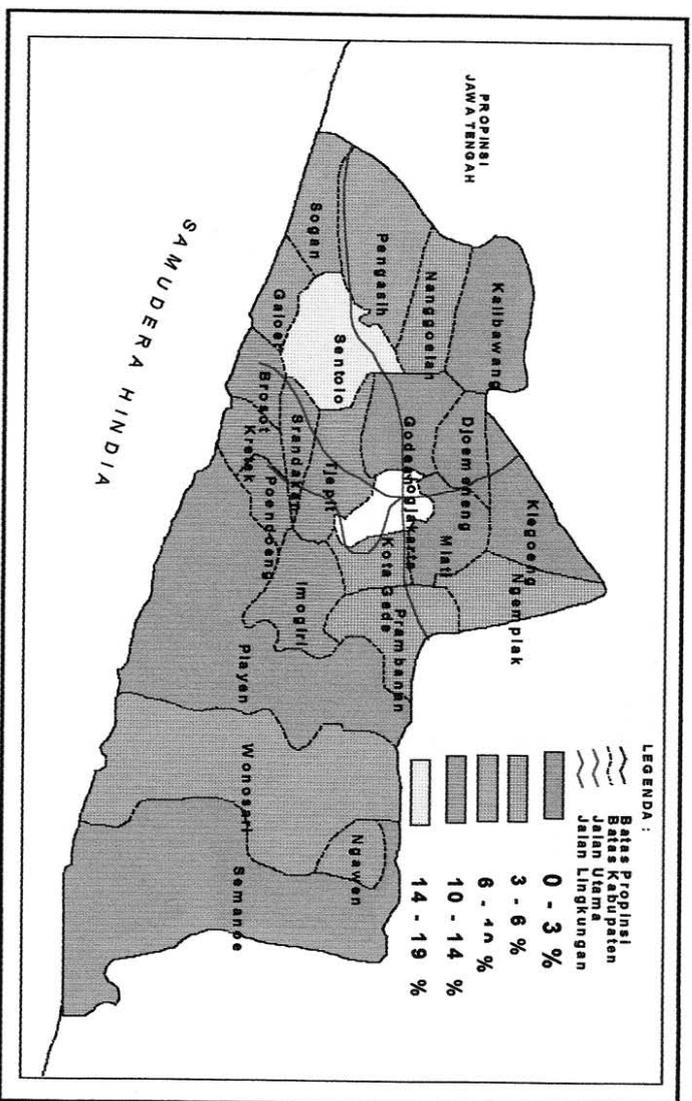
Sumber : C. W. Bagchus, *Maandgemiddelden en Bouwgrondoccupaties: per District van de Negen Belangrijkste Inlandsche Landbouwgewassen op Java en Madoera in de jaren 1920 tot en met 1925*, Weltevreden: Landrukkerij, 1929, hlm. 138.

Persentase Luas Lahan Garapan Kacang-kacangan dari Areal yang Ditanami
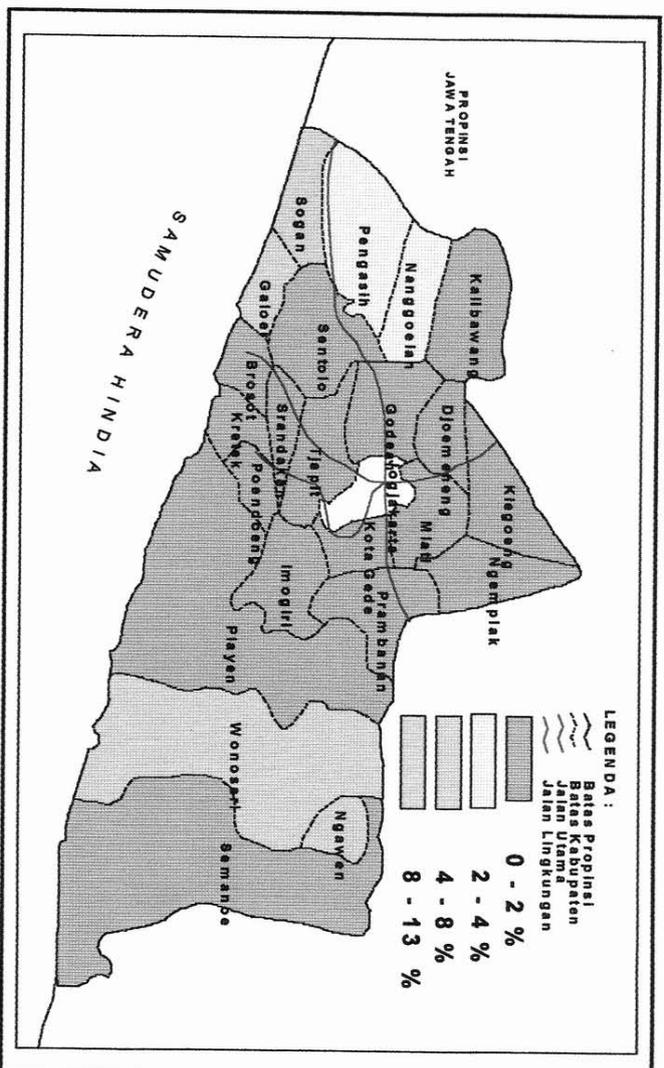
Sumber : C. W. Bagchus, *Maandgemiddelden en Bouwgrondoccupaties: per District van de Negen Belangrijkste Inlandsche Landbouwgewassen op Java en Madoera in de jaren 1920 tot en met 1925*, Weltevreden: Landrukkerij, 1929, hlm. 138.

Persentase Luas Lahan Garapan Tembakau dari Areal yang Ditanami
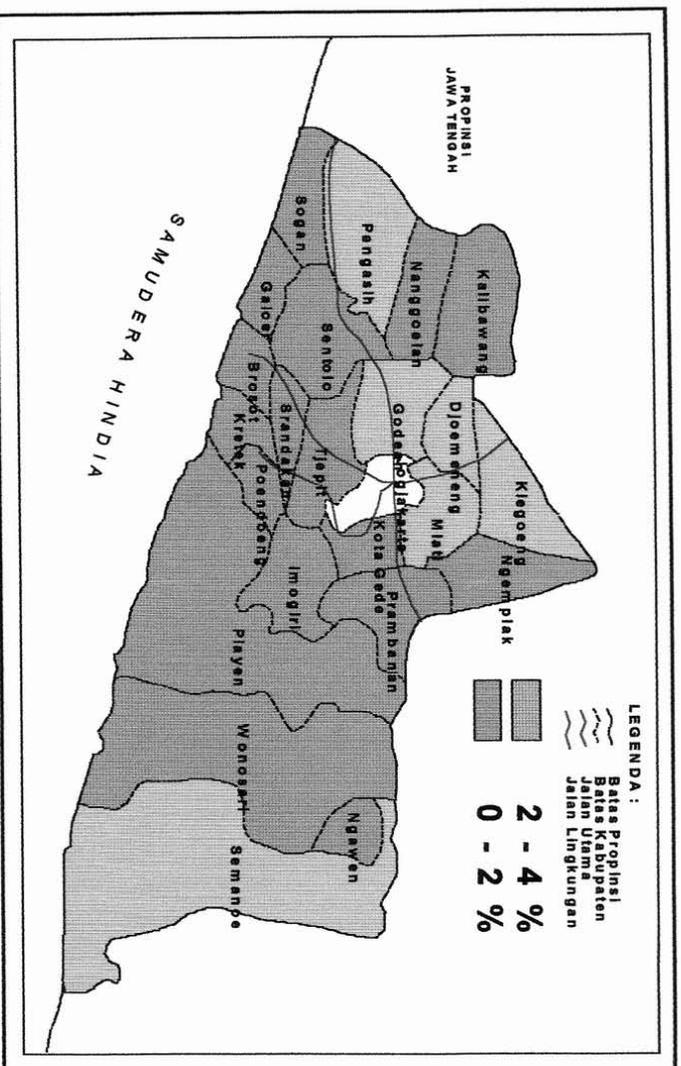
Sumber : C. W. Bagchus, *Maandgemiddelden en Bouwgrondoccupaties: per District van de Negen Belangrijkste Inlandsche Landbouwgewassen op Java en Madoera in de jaren 1920 tot en met 1925*, Weltevreden: Landrukkerij, 1929, hlm. 138.

INDEKS

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

TENTANG PENULIS

Rhoma Dwi Aria Yuliantri dilahirkan di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 4 Juli 1982. Memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada tahun 2004 dan Program Studi Pendidikan Sejarah UNY pada tahun 2007.

Setelah itu melanjutkan studi di Program Pasca Sarjana Bidang Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan lulus pada tahun 2010. Di tahun yang sama juga mendapat kesempatan *visiting fellow (researcher)* di Royal Nederlands Institute of Southeast Asia and Caribbbean Studies (KITLV), Leiden, Belanda.

Telah menulis beberapa buku, di antaranya trilogi *Lekra Tak Membakar Buku, Laporan dari Bawah,* dan *Gugur Merah* (Yogyakarta: Merakesumba, 2008), kemudian terlibat dalam penulisan buku hasil riset sejarah, antara lain: *Seabad Pers Kebangsaan 1907-2007* (Jakarta: Indonesiabuku, 2008), *Seabad Pers Perempuan 1908-2008* (Jakarta: Indonesiabuku, 2008), dan sejumlah karya lainnya baik yang dibukukan maupun yang dimuat di media massa.

Selain itu, penulis juga terlibat sebagai kontributor dalam *Heirs to World Culture: Being Indonesia 1950-1965* yang diterbitkan dalam dua bahasa oleh KITLV Press Leiden (Belanda) pada tahun 2012 dan Pustaka Larasan (Indonesia) pada tahun 2011. Saat ini, penulis juga menjalani profesi sebagai tenaga pengajar di Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial (FIS), UNY, serta masih aktif dalam melakukan penelitian atau penulisan.